



P E R U B A H A N RENCANA STRATEGIS BAPPEDA & LITBANG TAHUN 2016 - 2021



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

TAHUN 2018



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya, ***“Perubahan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021”*** dapat selesai disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan Renstra merupakan penjabaran teknis dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021. Selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari Rencana Strategik dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Perubahan Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang kami sebutkan satu per satu di sini.

Kami menyadari, Perubahan Renstra ini masih banyak kekurangannya, namun demikian dengan Perubahan Renstra ini semua kebijakan dan program yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Malinau mau pun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bahan masukan dan yang telah membantu memberikan saran-saran dan pendapat untuk perbaikan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Malinau, kami ucapkan terimakasih.

Malinau, 28 September 2018

**KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN MALINAU,**

Drs. Kristian, M.Si

Nip. 19661123 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	13
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	13
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	33
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	37
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Pencapaian Kinerja Pelayanan..	53
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	60
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	60
3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	63
3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi.....	70
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.....	73
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	79

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	83
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	86
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	89
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	90
BAB VIII	PENUTUP.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Bappeda dan Litbang Sesuai Bidang Tugas Tahun 2018	33
Tabel 2.2	Kondisi Pegawai Bappeda dan Litbang Menurut Pendidikan Formal Tahun 2018	34
Tabel 2.3	Kondisi Pegawai Bappeda dan Litbang Menurut Golongan/Ruang Pangkat Kepegawaian Tahun 2018....	34
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda dan Litbang	35
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Dan Litbang Kabupaten Malinau	44
Tabel 2.6	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Dan Litbang Kabupaten Malinau	52
Tabel 2.7	Analisis Lingkungan Internal (ALI) Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau	53
Tabel 2.8	Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau	54
Tabel 2.9	Analisis Strategi alternative dan pilihan Dengan Analisis SWOT	55
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Daerah...	65
Tabel 3.2	Sasaran Dalam Renstra Bappenas, Bappeda dan Litbang KALTARA dan Bappeda dan Litbang Malinau ..	71
Tabel 3.3	Telaahan RTRW Terkait Pelayanan Bappeda Dan Litbang.....	78
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Bappeda berdasarkan Analisis KLHS	79
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda dan Litbang	84
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	87
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda dan Litbang	89

Tabel 7.1	Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Malinau 2016 – 2021 ...	92
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau	29
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Kabupaten Malinau selama lima tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan visi Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)”**. Pernyataan visi tersebut merupakan suatu pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Organisasi Bappeda dan Litbang (OPD) harus memiliki Rencana Strategi (Renstra-OPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra-OPD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Berkaitan itu juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) guna

mengoperasionalkan program yang ada dalam RPJMD, Organisasi Bappeda dan Litbang (OPD) harus menyusun Rencana Strategis OPD yang berisikan program dan kegiatan indikatif OPD selama lima tahun. Program dan kegiatan dalam Renstra OPD harus terkait dengan sasaran RPJMD, dengan demikian Renstra OPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) OPD adalah dokumen perencanaan teknis operasional OPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Bappeda dan Litbang (OPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya di sebut Renstra OPD. Dokumen Renstra OPD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Selain itu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat Bappeda dan Litbang lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal,

nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Malinau sesuai tugas dan fungsinya adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah perlu menyusun suatu rencana strategik agar dapat menentukan arah perkembangan organisasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya perubahan Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Secara umum terdapat tiga perubahan lingkungan strategis yang harus dihadapi selama ini dan masa yang akan datang yaitu demokratisasi, desentralisasi, dan globalisasi. Demokratisasi: yang menuntut adanya partisipasi yang luas dari masyarakat dalam kegiatan perencanaan di lingkungannya; Desentralisasi: yang menuntut adanya ruang gerak yang memadai bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri; Globalisasi: yang telah membuka akses teknologi dan arus

informasi sehingga nilai-nilai sosial budaya yang baru dapat mempengaruhi sistem nilai yang telah berkembang di masyarakat.

Dalam menanggapi perubahan lingkungan dan perkembangan pemerintahan yang semakin kompleks, Bappeda dan Litbang dituntut dapat melaksanakan reorientasi, restrukturisasi, dan revitalisasi manajemen kerja, agar lebih efektif, efisien, dan profesional. Pada saatnya diharapkan dinamika kelembagaan Bappeda dan Litbang dapat mengimbangi berbagai tantangan dan tuntutan di masa depan yang semakin kompleks, yang ditandai dengan perubahan kondisi masyarakat yang semakin transparan. Adanya kejelasan visi, misi dan strategi organisasi Bappeda dan Litbang di masa depan akan memudahkan Bappeda dan Litbang melaksanakan kegiatannya dalam merumuskan berbagai program dan kegiatan perencanaan. Dalam memberikan makna terhadap eksistensi kelembagaan, diperlukan Rencana Strategis (Renstra) yang lebih jelas dan terarah sebagai penentu arah bagi seluruh aktifitas organisasi.

1.2. Landasan Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Bappeda dan Litbang;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 adalah:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
- b. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah.
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Malinau terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- d. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

Tujuan umum dari penyusunan dokumen perubahan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 adalah:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Bappeda dan Litbang sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.

- b. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistemik di masa depan.
- c. Meningkatkan komunikasi antara para pemangku kepentingan/multi pihak dalam pelayanan terkait perencanaan pembangunan daerah.

Kedudukan Renstra sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

Perubahan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 mempunyai hubungan yang sinergis dan implementatif dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu: Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 dan Rencana Tata Ruang Daerah Tahun 2012-2032.

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan perubahan Renstra Bappeda dan Litbang merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau khususnya dalam menjalankan agenda rencana pembangunan yang telah tertuang dalam perubahan RPJMD. Untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, perubahan Renstra Bappeda dan Litbang akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Bappeda dan Litbang (Renja Bappeda dan Litbang) yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau.

Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renja Bappeda dan Litbang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) Bappeda dan Litbang, selanjutnya substansi RKA tersebut akan tercermin pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Bappeda dan Litbang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga berdasarkan ketentuan itu maka sistematika penulisan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang

- 2.2. Sumber Daya Bappeda dan Litbang
- 2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda dan Litbang

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA DAN LITBANG

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda dan Litbang
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda dan Litbang

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda dan Litbang

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Bappeda dan Litbang Yang Mengacu
Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang

Dalam rangka menjamin perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 27 Tahun 1980 dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Malinau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, mempunyai :

1. Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Data , Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
 - e. Bidang Ekonomi;
 - f. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - g. Bidang Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang terdiri atas:
 - a. Subbagian Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Subbagian Penyusunan Program.
3. Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
 - a. Subbidang Pengelolaan Data Spasial;
 - b. Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan

Daerah;

- c. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

- 4. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
 - a. Subbidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
 - b. Subbidang Pengembangan Wilayah, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
 - c. Subbidang Keciaptakaryaan dan Pengairan.
- 5. Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
 - a. Subbidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - b. Subbidang Perekonomian dan Pariwisata;
 - c. Subbidang Ketenagakerjaan dan Investasi.
- 6. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas :
 - a. Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan OlahRaga;
 - b. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 - c. Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 7. Bidang Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas :
 - a. Subbidang Pembiayaan Pembangunan Daerah;
 - b. Subbidang Penelitian;
 - c. Subbidang Pengembangan.

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Litbang, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

a. Tugas :

Membantubupati melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di bidang Data, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan, Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

b. Fungsi :

- 1). Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Tugas Pokok :

Memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan

kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian, serta pengelolaan dan laporan keuangan.

Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
 - b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
 - c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;
 - d. Penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan laporan;
 - e. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum, dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Fungsi :

- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- c) Penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga;
- d) Penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian; dan
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2) Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi, dan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan badan

Fungsi :

- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan;
- c) Pengelolaan anggaran, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan; dan
- d) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan.

3) Subbagian Penyusunan Program

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan, dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program badan.

Fungsi :

- a) Penyusunan rencana kerja Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
- c) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- d) Pengoordinasian penyusunan rencana kerja; dan
- e) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan.

3. Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Daerah

Tugas Pokok :

Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang data spasial, pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah serta monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang data spasial, pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah pembangunan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang data spasial, pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah, serta monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang data spasial, pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah, serta monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang data spasial, pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah, serta monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;
- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan

pemerintah daerah di bidang data spasial, pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah, serta monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;

f. Pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbidang Pengelolaan Data Spasial

Tugas Pokok :

Subbidang Pengelolaan Data Spasial mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian berkenaan pemetaan.

2) Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Tugas Pokok :

Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi , menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian, serta melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi serta publikasi mengenai pelaksanaan pembangunan di kabupaten.

3) Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Tugas Pokok :

Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah (APBD, DAK, Bankeu, Dekon, TP) serta sumber lainnya.

4. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Tugas Pokok :

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis bidang sarana dan prasarana wilayah, pengembangan wilayah, lingkungan hidup dan sumber daya alam serta keciptakaryaan dan pengairan

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sarana dan prasarana wilayah, pengembangan wilayah, lingkungan hidup dan sumber daya alam serta keciptakaryaan dan pengairan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sarana dan prasarana wilayah, pengembangan wilayah, lingkungan hidup dan sumber daya alam serta keciptakaryaan dan pengairan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sarana dan prasarana wilayah, pengembangan wilayah, lingkungan hidup dan sumber daya alam serta keciptakaryaan dan pengairan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sarana dan prasarana wilayah, pengembangan wilayah, lingkungan hidup

dan sumber daya alam serta keciptakaryaan dan pengairan;

- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sarana dan prasarana wilayah, pengembangan wilayah, lingkungan hidup dan sumber daya alam serta keciptakaryaan dan pengairan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbidang Prasarana dan Sarana Wilayah

Tugas Pokok :

Menyiapkan perencanaan pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana wilayah yang meliputi infrastruktur perhubungan, telekomunikasi dan energi.

2) Subbidang Pengembangan Wilayah, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Tugas Pokok :

Menyiapkan perencanaan pengembangan wilayah, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

3) Subbidang Keciptakaryaan dan Pengairan

Tugas Pokok :

Menyiapkan perencanaan pembangunan keciptakaryaan dan pengairan.

5. Bidang Ekonomi

Tugas Pokok :

Melaksanakan dan menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan

penyelenggaraan pembinaan teknis bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Perekonomian dan Pariwisata Ketenagakerjaan dan Investasi

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Perekonomian dan Pariwisata Ketenagakerjaan dan Investasi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Perekonomian dan Pariwisata Ketenagakerjaan dan Investasi;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Perekonomian dan Pariwisata Ketenagakerjaan dan Investasi ;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Perekonomian dan Pariwisata Ketenagakerjaan dan Investasi ;
- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Perekonomian danPariwisata Ketenagakerjaan dan Investasi;
- f. Pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Tugas Pokok :

Menyiapkan koordinasi perencanaan pengelolaan potensi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

2) Subbidang Perkenonomian dan Pariwisata

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan berkenaan pembangunan perekonomian dan kepariwisataan (perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM).

3) Subbidang Ketenagakerjaan dan Investasi

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan ketenagakerjaan dan investasi serta penanaman modal.

6. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan

Tugas Pokok :

Melaksanakan dan menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, kesehatan dan kesejahteraan sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, kesehatan dan kesejahteraan sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, kesehatan dan kesejahteraan

- sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, kesehatan dan kesejahteraan sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, kesehatan dan kesejahteraan sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, kesehatan dan kesejahteraan sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 1) Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
Tugas Pokok :
Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya manusia dan budaya.
 - 2) Subbidang kesehatan dan kesejahteraan sosial
Tugas Pokok :
Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan berkenaan dengan peningkatan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial.
 - 3) Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan pembinaan, pengembangan organisasi dan pembangunan pemerintahan desa serta berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat.

7. Bidang Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan

Tugas Pokok :

Melaksanakan dan menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pembiayaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan di bidang pembiayaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pembiayaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pembiayaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang pembiayaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala

badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbidang Pembiayaan Pembangunan Daerah

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen pembiayaan dan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, KUPA dan PPAS).

2) Subbidang Penelitian

Tugas Pokok :

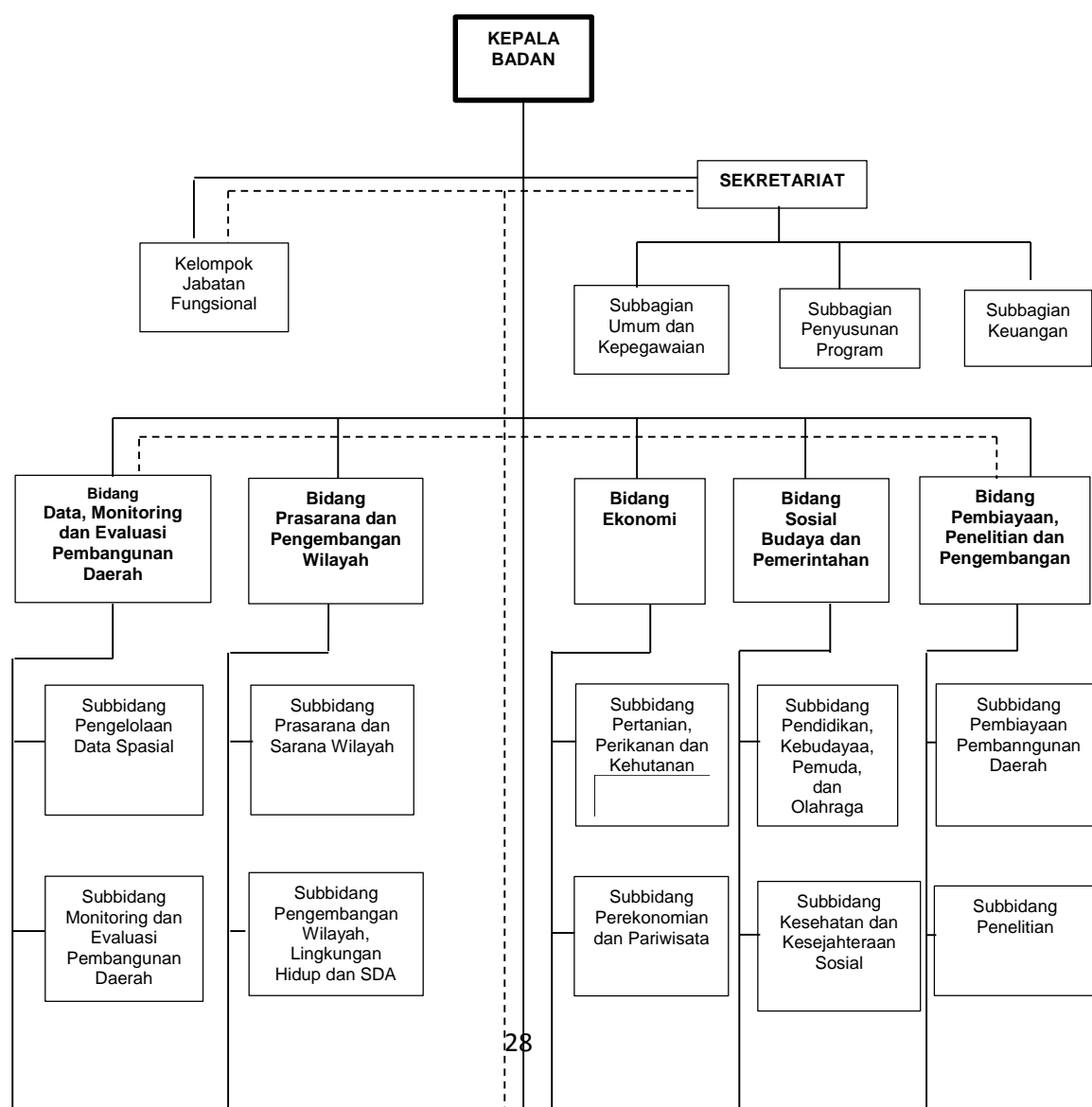
Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kajian potensi sumber daya (alam dan sosial) serta kajian pengelolaannya.

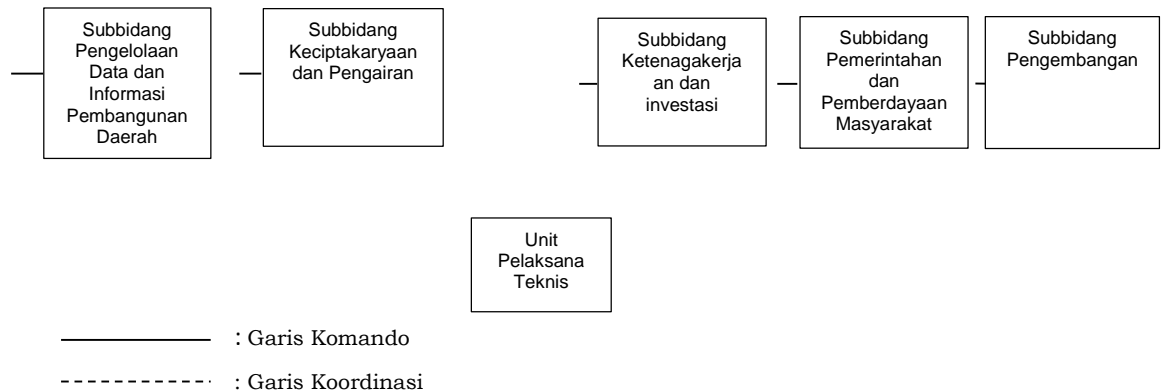
3) Subbidang Pengembangan

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan berkenaan dengan sistem inovasi daerah (SIDA) berbasis teknologi.

2.1.2 Bagan Struktur Organisasi





Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda dan Litbang

2.1.3. Tata Laksana

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Pembinaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk pelaksanaan tugas tersebut telah dilengkapi dengan tata laksana berupa tahapan dan mekanisme baku. Tata laksana yang disusun dan diterapkan terdiri dari 2 aspek, yaitu internal dan eksternal. Tata laksana internal

berupa tahapan dan mekanisme yang diberlakukan dalam pelaksanaan tugas di lingkup instansi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau. Sedangkan tata laksana eksternal kaitannya dengan pihak lain diluar Bappeda dan Litbang, baik itu antar OPD, masyarakat luas dan pihak-pihak lain yang menjadi stakeholder dan shareholder aspek perencanaan daerah.

1. Tata Laksana Internal

Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan internal dengan tahapan dan mekanisme baku, Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau telah menyusun dan menerapkan SOP yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun tata laksana berupa tahapan dan mekanisme baku yang juga disebut SOP urusan-urusan internal yang telah disusun oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau meliputi :

- a. Prosedur Mutu No.01 Pembinaan Pegawai
- b. Prosedur Mutu No.02 Pengadaan Pegawai
- c. Prosedur Mutu No.03 Pengembangan Kompetensi Pegawai
- d. Petunjuk Teknis No.04 Pengendalian Database Kepegawaian
- e. Petunjuk Teknis No.05 Pengendalian Kedisiplinan Pegawai

- f. Prosedur Mutu No.06 Pengadaan Bahan Habis Pakai
- g. Prosedur Mutu No.07 Penanganan Kerusakan Barang
- h. Petunjuk Teknis No.08 Distribusi Bahan Habis Pakai
- i. Petunjuk Teknis No.09 Pengendalian Barang Inventaris
- j. Petunjuk Teknis No.10 Pengendalian Surat Masuk
- k. Petunjuk Teknis No.12 Pengendalian Surat Keluar
- l. Prosedur Mutu No.13 Pengajuan Tor

2. Tata Laksana Eksternal

Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan eksternal dengan berbagai pihak, sesuai dengan tahapan dan mekanisme baku, Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau telah menyusun dan menerapkan SOP eksternal. Sedangkan untuk melaksanakan tugas yang terkait dengan penyediaan dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA/PPAS telah mengacu pada peraturan perundangan, juklak dan juknis yang ada.

Tata laksana berupa tahapan dan mekanisme baku yang juga disebut SOP urusan-urusan eksternal yang telah disusun oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau meliputi :

- a. Prosedur Mutu No.14 Pemberian Ijin Kuliah Kerja Nyata
- b. Prosedur Mutu No.15 Pemberian Ijin Penelitian
- c. Prosedur Mutu No.16 Pemberian Ijin Pkl
- d. Prosedur Mutu No. 17 Persiapan Pembuatan Dokumen Perencanaan
- e. Prosedur Mutu No. 18 Pengembangan Dokumen

Perencanaan

- f. Prosedur Mutu No. 19 Penyusunan Dokumen Rppj
- g. Prosedur Mutu No. 20 Penyusunan Dokumen Rpjmd
- h. Prosedur Mutu No. 21 Penyusunan Dokumen Rkpd
- i. Prosedur Mutu No. 22 Penyusunan Dokumen Renstra
- j. Prosedur Mutu No. 23 Penyusunan Dokumen Renja

2.2. Sumber Daya Bappeda dan Litbang

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur yang dimiliki Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang sebagai institusi perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah per April 2018 sebanyak 48 orang, sesuai bidang tugasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Bappeda dan Litbang Sesuai Bidang Tugas Tahun 2018

NO	BIDANG TUGAS	ESELON						STAF PELAKSANA		JUMLAH	
		II		III		IV		L	P	L	P
		L	P	L	P	L	P				
1	Kepala	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	3	5	4	6	7
3	Kepala Bidang Pembiayaan, Litbang	-	-	1	-	2	1	3	1	6	2
4	Kepala Bidang Prasarana Pengembangan Wilayah	-	-	1	-	1	2	3	-	5	2
5	Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	-	-	1	-	2	1	1	2	4	3

6	Kepala Bidang Ekonomi	-	-	1	-	1	2	2	1	4	3
7	Kepala Bidang Data dan Informasi	-	-	1	-	1	2	3	1	5	3
JUMLAH										31	20

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda dan Litbang

Adapun sumber daya aparatur Bappeda dan Litbang yang berjumlah 51 orang tersebut memiliki latar belakang pendidikan, pangkat dan golongan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.

Kondisi Pegawai Bappeda dan Litbang Menurut Pendidikan Formal Tahun 2018

NO.	JENIS PENDIDIKAN FORMAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	SD	-	-	-
	SMP	-	-	-
	SMA/SMK	12	2	14
	D3/D4	2	3	5
	S1	9	9	18
	S2	8	6	14
	S3	-	-	-
	JUMLAH	31	20	51

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda dan Litbang

Tabel 2.3.

Kondisi Pegawai Bappeda dan Litbang Menurut Golongan/Ruang Pangkat Kepegawaian Tahun 2018

NO.	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	IV	4	-	4
	III	14	14	28
	II	13	6	19
	I	-	-	-
	JUMLAH	31	20	51

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda dan Litbang

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Jumlah ruang di lingkungan Bappeda dan Litbang

Kabupaten Malinau terdiri dari 9 ruang meliputi 7 ruang kerja, 1 ruang rapat, dan 1 gudang. Luasan gedung Bappeda dan Litbang seluruhnya seluas 800 m².

Adanya sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang.

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda dan Litbang menurut data inventaris barang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4.
Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda dan Litbang

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
I.	KEPALA		
1.	Kendaraan Roda 4	1 Unit	Mobil Double gandan
2.	Komputer	1 Unit	
3.	Meja Kerja	2 Unit	
4.	Kursi Kerja	3 Unit	
5.	Sofa	1 Set	
6.	Pesawat Telpon	1 Unit	
7.	Lemari	1 Unit	
II.	SEKRETARIAT		
1.	Kendaraan Roda 4	2 Unit	Mobil Double gandan
2.	Kendaraan Roda 2	2 Unit	2 Kurang Baik
3.	Komputer PC	10 Unit	1 Kurang Baik
4.	Laptop	8 Unit	3 Kurang Baik
5.	Printer	9 Unit	2 Kurang Baik
6.	LCD Proyektor	5 Unit	2 Rusak Berat
7.	Mesin Ketik	1 Unit	
8.	Wireless	1 Unit	
9.	Camera	5 Unit	2 Kurang Baik
10.	Handycam	1Unit	
11.	Brankas	2 Unit	
12.	Mesin Photocopy	1 Unit	
13.	Pesawat Telpon	1 Unit	
14.	Meja Kerja	15 Unit	2 Kurang Baik dan 3 Rusak Berat
15.	Kursi Kerja	21 Unit	3 Kurang Baik dan 3 Rusak Berat
16.	Scanner	1 Unit	1 Kurang Baik
17.	Alat Potong Kertas	2 Unit	1 Kurang Baik

18.	Drone	Unit	
19.	Lemari	10 Unit	
20.	Filing Kabinet	1 Unit	
21.	Sofa	2 Set	2 Kurang Baik
22.	Stapler Besar	2 Unit	1 Kurang Baik
23.	CPU	5 Unit	1 Kurang Baik
24.	GPS	2 Unit	
25.	UPS	3 Unit	1 Kurang Baik
26.	Stavol	2 Unit	
III.	BIDANG EKONOMI		
1.	Kendaraan roda empat	-	
2.	Kendaraan roda dua	1 Unit	
3.	Komputer PC	-	
4.	Mesin ketik	-	
5.	Printer	-	
6.	Laptop	1 Unit	
7.	Meja Kerja	4 Unit	2 Kurang Baik
8.	Kursi Kerja	7 Unit	1 Rusak Berat
9.	Camera	1 Unit	
10.	Lemari	2 Unit	
IV.	BIDANG DATA, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
1.	Kendaraan roda empat	-	
2.	Kendaraan roda dua	1 Unit	1 Kurang Baik
3.	Komputer PC	4 Unit	
4.	Mesin ketik	-	
5.	Printer	6 Unit	
6.	Laptop	2 Unit	
7.	Meja Kerja	9 Unit	
8.	Kursi Kerja	14 Unit	
9.	Pesawat telepon	-	
10.	Lemari	7 Unit	
11.	Filing Kabinet	1 Unit	
.			
V.	BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN PEMERINTAHAN		
1.	Kendaraan roda empat	-	
2.	Kendaraan roda dua	1 Unit	1 Kurang Baik
3.	Komputer PC	3 Unit	1 Rusak Berat
4.	Mesin ketik	-	
5.	Printer	3 Unit	1 Rusak Berat
6.	Laptop	2 Unit	
7.	Meja Kerja	10 Unit	4 Kurang Baik
8.	Kursi Kerja	12 Unit	3 Kurang Baik
9.	Pesawat telepon	-	
10.	Lemari	4 Unit	1 Kurang Baik
11.	Filing Kabinet	3 Unit	3 Kurang Baik
12.	UPS	2 Unit	1 Rusak Berat
VI.	BIDANG PRASARANA DAN		

	PENGEMBANGAN WILAYAH		
1.	Kendaraan roda empat	-	
2.	Kendaraan roda dua	-	
3.	Komputer PC	3 Unit	
4.	Mesin ketik	-	
5.	Printer	5 Unit	3 Kurang Baik
6.	Laptop	4 Unit	2 Kurang Baik
7.	Meja Kerja	10 Unit	3 Kurang Baik
8.	Kursi Kerja	11 Unit	2 Kurang Baik
9.	Pesawat telepon	-	
10.	Lemari	5 Unit	1 Kurang Baik
11.	GPS	2 Unit	
12.	Planimeter	1 Unit	
13.	Mesin Floter	1 Unit	
14.	CPU	1 Unit	1 Kurang Baik
15.	UPS	2 Unit	2 Rusak Berat
16.	Stavol	1 Unit	
VII.	BIDANG PEMBIAYAAN, LITBANG		
1.	Kendaraan roda empat	-	
2.	Kendaraan roda dua	-	
3.	Komputer PC	5 Unit	
4.	Mesin ketik	-	
5.	Printer	4 Unit	1 Kurang Baik
6.	Laptop	-	
7.	Meja Kerja	10 Unit	3 Kurang Baik
8.	Kursi Kerja	9 Unit	
9.	Pesawat telepon	-	
10.	Lemari	5 Unit	
11.	CPU	1 Unit	
12.	UPS	1 Unit	
VIII.	RUANG RAPAT		
1.	Meja Rapat Panjang	1 Unit	
2.	Kursi Rapat	22 Unit	5 Kurang Baik dan 7 Rusak Berat
3.	Komputer PC	1 Unit	
4.	Papan Tulis	1 Unit	
5.	Layar Pananboard	1 Unit	
6.	Lemari	2 Unit	

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda dan Litbang

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang

2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang sebagaimana Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas

pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

1. politik;
2. teknokratik;
3. partisipatif;
4. atas-bawah (*top-down*); dan
5. bawah-atas (*bottom-up*).

Berdasarkan pendekatan politik, telah dilakukan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan damai. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing

calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Bappeda dan Litbang selaku institusi perencanaan menyiapkan dokumen RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dan program prioritas daerah, yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Melalui pendekatan teknokratik, Bappeda dan Litbang melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD dan penyusunan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kewenangan. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh Organisasi yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, dan desa yang lebih dikenal dengan Musrenbang Daerah.

Pendekatan Top Down-Bottom Up dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke atas

(bottom up) merupakan pendekatan perencanaan yang mengikuti kebutuhan nyata, sementara dari atas ke bawah (top down) menerapkan penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “di bawah” adalah penjabaran rencana induk yang berada “di atas”. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis di berbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan dari “atas ke bawah” memberikan gambaran tentang perkiraan dan kemungkinan yang ada dan diinformasikan secara berjenjang sehingga proses perencanaan “dari bawah ke atas” diharapkan sejalan dengan “dari atas ke bawah”, begitu pula sebaliknya, perencanaan “dari atas ke bawah” juga harus memperhatikan perencanaan “dari bawah ke atas” yang merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dimaksud, disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni;

1. Penyusunan rencana;
2. Penetapan rencana;
3. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana;

Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah.

Langkah pertama, adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.

Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

Langkah ketiga, adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Langkah keempat, adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Organisasi Bappeda dan Litbang.

Selanjutnya Kepala Bappeda dan Litbang menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Organisasi Bappeda dan Litbang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Bappeda dan Litbang berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah harus terus menerus melakukan upaya peningkatan. Beberapa indikator yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya forum OPD dan gabungan OPD;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat Kabupaten oleh Bappeda dan Litbang dan OPD terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda dan Litbang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi: master plan, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
3. Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui Focussed Group Discussion (FGD);
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Evaluasi capaian hasil renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau periode sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa keberhasilan antara lain seperti pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6

TABEL 2.5
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN MALINAU

	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA DAN LITBANG	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PD TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN KE				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN																		
I	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																		
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		10 Dokumen		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan		1850 Orang		400	420	420	420	420	432	431	502	436	422	1.08	1.03	1.20	1.04	1.00
3	Jumlah Dokumen Perencanaan KUA, PPAS-Perubahan dan KUA, PPAS		20 Dokumen		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4	Jumlah Pertemuan Koordinasi Kegiatan Bantuan Keuangan dan APBN		5 Kali		1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-
5	Jumlah Dokumen Evaluasi Dokumen Perencanaan		5 Kali		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	Jumlah Ekpose		42 Kali		12	8	8	-	-	14	8	8	-	-	1.17	1.00	1.00	-	-
7	Jumlah Pertemuan Sosialisasi		1 Kali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Jumlah Dokumen Naskah Akademik Penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau		1 Dokumen		-	-	-	1	1	-	-	-	0	1	-	-	-	0.00	1.00
9	Jumlah Dokumen RPJM		1 Dokumen		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
10	Jumlah Paket Pelatihan Penyusunan RPJMD dan RKPD		1 Paket		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-
11	Jumlah Dokumen Perencanaan Analisis Kerangka Pendanaan APBD Kabupaten Malinau Proeksi Tahun 2011-2016		1 Dokumen		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-
12	Jumlah pertemuan Konsultasi Renstra SKPD		53 Kali		53	-	-	-	-	53	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-
13	Jumlah Pertemuan Rapat Perencanaan Pembangunan		2 Kali		1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-

14	Jumlah Dokumen Kajian Beban Kerja PNS Kabupaten Malinau		1 Dokumen		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-
15	Jumlah Dokumen Perencanaan RIPJM (Rencana Investasi Program Jangka Menengah)		1 Dokumen		-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1.00	-	-	-
16	Jumlah Dokumen Kajian Implementasi Program Community Social Responsibility (CSR) Sektor Pertambangan, Perkayuan & Perkebunan di Kab. Malinau		1 Dokumen		0	1				0	1				1.00				
17	Jumlah Dokumen Program Community Social Responsibility (CSR)		1 Dokumen				1					1				1.00			
18	Jumlah Dokumen Analisis Kinerja Pemerintah Daerah		3 Dokumen			1	1	1			1	1	1		1.00	1.00	1.00		
19	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kabupaten Malinau		3 Dokumen			1	1	1	1		1	1	1	1	1.00	1.00	1.00	1.00	
20	Jumlah Dokumen Kajian Penyusunan Kinerja Pemerintah Kabupaten, Kecamatan & Desa		1 Dokumen		1					1					1.00				
21	Jumlah Dokumen Perencanaan Grand Desain 4 Pilar Pembangunan Kab. Malinau		1 Dokumen		1					1					1.00				
22	Persentase Pertemuan Konsultasi dan Kordinasi Bidang Fisik dan Prasarana		100%			100%					100%				1.00				
23	Persentase Pertemuan Konsultasi dan Kordinasi Bidang Pendataan dan Pelaporan		100%		100%	100%				100%	100%				1.00	1.00			
24	Persentase Pertemuan Konsultasi dan Kordinasi Bidang Ekosobud		100%		100%	100%				100%	100%				1.00	1.00			
25	Jumlah Pertemuan Konsultasi dan Kordinasi Bidang kelitbangan		2 Kali		1	1				1	1				1.00	1.00			
26	Persentase pertemuan dalam diskusi pemantapan pencapaian program Pembangunan yang baik oleh SKPD		4 Kali		1	1	1			1	1	1			1.00	1.00	1.00		
27	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RIP-SPAM) Kota Malinau		1 Dokumen				1					1					1.00		
28	Jumlah Dokumen RIPJM (Rencana Investasi Program Jangka Menengah)		2 Dokumen			1	1				1	1			1.00	1.00			
29	Jumlah Laporan Hasil Dialog Nasional Pembangunan Perbatasan		1 Laporan					1					1					1.00	
30	Jumlah Laporan Hasil Seminar Nasional Gerakan Desa Membangun Indonesia		1 Laporan					1					1					1.00	
II	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA																		
31	Jumlah Pertemuan kegiatan TKPK		4 Kali		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
32	Jumlah Dokumen Data Sosial-Ekonomi		2 Dokumen			1	1	1			1	1			1.00	1.00	0.00		

33	Persentase Pertemuan Koordinasi Sosial-Ekonomi Malaysia-Indonesia		100%		100%	100%	100%			100%	100%	100%			1.00	1.00	1.00		
34	Jumlah Dokumen IKM		1 Dokumen			1					1					1.00			
35	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Malinau		1 Dokumen			1					1					1.00			
36	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Rumah Tangga Miskin		1 Dokumen						1										0.00
37	Jumlah Laporan Hasil Analisis Kemiskinan		1 Laporan						1										0.00
38	Jumlah Dokumen Perencanaan Program Pro Rakyat dan Pencapaian MDGs Kabupaten Malinau		4 Dokumen		1	1	1			1	1	1			1.00	1.00	1.00		
39	Jumlah Dokumen Perencanaan Program Pro Rakyat dan Pencapaian MDGs Kabupaten Malinau		1 Dokumen					1	1				1	1				1.00	1.00
40	Jumlah Dokumen Data Base dan Profil Anak Kabupaten Malinau		1 Dokumen				1					1					1.00		
41	Jumlah Dokumen Kajian Kebutuhan Anggaran Pendidikan SD Negeri Kabupaten Malinau 2015 s/d 2020		1 Dokumen				1					1					1.00		
42	Jumlah Dokumen Penduduk Miskin dan Pembuatan Profil Sosial Ekonomi		1 Dokumen																
43	Jumlah Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)		1 Dokumen					1					1					1.00	
44	Jumlah Dokumen Pemetaan Kemiskinan dan Analisis Kemiskinan di Kabupaten Malinau		1 Dokumen					1					1					1.00	
45	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati Nomor 204 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan		1 Dokumen					1					1					1.00	
III	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI																		
46	Jumlah Dokumen RAD-PK		2 Dokumen			1	1	1			1		1			1.00	0.00	1.00	
47	Terfasilitasinya Tim Aksi PK Kab. Malinau		1 Kegiatan				1										0.00		
48	Jumlah Dokumen Kajian Penanggulangan Kemiskinan		1 Dokumen		1					1					1.00				
49	Jumlah Dokumen Kerangka Ekonomi Desa		1 Dokumen				1					1					1.00		
IV	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN																		
50	Jumlah Kajian Kerjasama Antar Daerah		1 Dokumen			1					1					1.00			
51	Terfasilitasinya DP3K TNKM		4 Kegiatan		1	1	1	1		1	1	1			1.00	1.00	1.00	0.00	
52	Terfasilitasinya DP3K TNKM		2 Kegiatan		1	1				1	1				1.00	1.00			

53	Jumlah Pertemuan Rapat Sinkronisasi dan Konsolidasi Data Pembangunan Se-Kaltim		1 Kali		1					1					1.00				
	URUSAN STATISTIK																		
V	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI																		
54	Jumlah dokumen Laporan Penyusunan LKPJ Bupati Malinau		5 Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
55	Jumlah Dokumen monitoring pelaksanaan Proyek, APBN, TP, UB, DAK, APBD I/Bantuan Keuangan Provinsi		5 Dokumen			1	1	1			1	1				1.00	1.00	0.00	
56	Jumlah Dokumen monitoring pelaksanaan Proyek, APBN, TP, UB, DAK, APBD I/Bantuan Keuangan Provinsi		3 Dokumen		1	1	1			1	1	1			1.00	1.00	1.00		
57	Jumlah dokumen Profil Daerah, Monografi Kecamatan		4 Dokumen		1		1	1	1	1		1		1	1.00		1.00	0.00	1.00
58	Jumlah dokumen Profil Daerah		1 Dokumen						1										0.00
59	Jumlah Dokumen Data Base Pembangunan		4 Dokumen		1	1				1	1				1.00	1.00			
60	Dokumen Angka Kepuasan Masyarakat (IKM)		2 Dokumen			1	1	1	1		1	1				1.00	1.00	0.00	0.00
61	Jumlah Dokumen SOP pelaksanaan Gerdema		2 Dokumen		1	1				1	1				1.00	1.00			
62	Jumlah Pelaksanaan Pameran		2 Kali		1					1					1.00				
	URUSAN PERENCANAAN TATA RUANG																		
VI	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG																		
63	Jumlah Pertemuan sosialisasi RTRW Kabupaten Malinau 2010-2030		1 Kali		1					1					1.00				
64	Jumlah Dokumen Evaluasi Perda RTRW Kabupaten Malinau 2011-2013		1 Dokumen		1					1					1.00				
65	Jumlah Perda RTRW Kabupaten Malinau 2010-2030		1 Perda		1					1					1.00				
66	Jumlah Peta Kecamatan		1 Peta			1					1					1.00			
67	Jumlah Peta Dasar RDTR		1 Peta			1					1					1.00			
68	Jumlah Dokumen RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan		1 Dokumen				1					1					1.00		

69	Jumlah Kebijakan Tentang RDTRK dan PZ Kawasan Perkotaan		1 Dokumen						1										0.00
70	Jumlah Dokumen Reproduksi Peta Tematik Kabupaten Malinau		1 Dokumen				1					1					1.00		
71	Jumlah Cetak Peta		1 Peta					1					1					1.00	
72	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Struktur dan Pola Ruang RTRW Kabupaten Malinau		1 Dokumen				1	1	1			1					1.00	0.00	0.00
73	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Struktur dan Pola Ruang RTRW Kabupaten Malinau		3 Dokumen		1	1				1	1					1.00	1.00		
74	Jumlah Dokumen Pengindraan Jau Perkotaan Kabupaten Malinau		1 Dokumen						1										0.00
75	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Struktur dan Pola Ruang RTRW Kabupaten Malinau		3 Dokumen		1	1		1		1	1		1			1.00	1.00		1.00
76	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi Ranperda RDTR dan PZ		1 Dokumen					1	1				1	1				1.00	1.00
77	Jumlah Dokumen Kegiatan Hibah Pembangunan Hijau		1 Dokumen					1	1				1	1				1.00	1.00
VII	PROGRAM PENATAAN RUANG																		
78	Jumlah Dokumen Perencanaan Inventarisasi dan pendataan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman		1 Dokumen		1					1						1.00			
79	Jumlah Dokumen Perencanaan Inventarisasi dan pendataan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman		1 Dokumen			1					1						1.00		
80	Jumlah Dokumen Masterplan dan DED PLTA Kabupaten Malinau		1 Dokumen		1					1						1.00			
81	Jumlah Peta Desa yang terletak dalam KBK dan Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Malinau		1 Peta		1	1				1	1					1.00	1.00		
82	Jumlah Peta Tutupan Lahan Kabupaten Malinau		1 Peta		1					1						1.00			
83	Jumlah Dokumen Master Plan Drainase Kawasan Perkotaan Malinau		1 Dokumen		1					1						1.00			
84	Pertemuan Pokja AMPL		3 Kali		1	1	1	1	1	1	1	1				1.00	1.00	1.00	0.00
85	Pertemuan SPPIP		1 Kali			1					1						1.00		
86	Jumlah Peta Kawasan Ibu Kota Kecamatan di Perbatasan dan Pedalaman		1 Peta		1					1						1.00			
VIII	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITASI PERHUBUNGAN																		

87	Jumlah Peta Jaringan Jalan		1 Peta		1					1					1.00				
88	Jumlah Dokumen Master Plan Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu (IPLT) Perkotaan		1 Dokumen			1					1					1.00			
89	Jumlah Dokumen Master Plan Telekomunikasi		1 Dokumen			1					1					1.00			
90	Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Pelabuhan Khusus Batubara		1 Dokumen			1					1					1.00			
91	Jumlah Dokumen Revisi Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)		1 Dokumen			1					1					1.00			
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN																		
92	Jumlah Dokumen Inventarisasi dan Pendataan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman		2 Dokumen		1	1				1	1					1.00	1.00		
X	PROGRAM KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KHLS) KABUPATEN MALINAU																		
93	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) Kabupaten Malinau		1 Dokumen		1					1						1.00			
94	Jumlah Dokumen Study Kelayakan Obyek Wisata Terpadu Pulau Mekuom Desa Malinau Seberang Kec. Mainau Utara Kab. Malinau		1 Dokumen		1					1						1.00			
95	Jumlah Dokumen Study Pengembangan Obyek Wisata Semolon		1 Dokumen		1					1						1.00			
XI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH																		
96	Jumlah Dokumen Study Kelayakan Pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri di Kecamatan Kayan Hulu		1 Dokumen		1					1						1.00			
97	Jumlah Dokumen Study Kelayakan Pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri di Kecamatan Mentarang Hulu		1 Dokumen		1					1						1.00			
98	Jumlah Laporan Kegiatan Kemakmuran Hijau		1 Laporan							1									0.00
XII	POLA MEKANISME OPERASIONALISASI GERAKAN DESA MEMBANGUN																		
99	Jumlah Dokumen Pedoman Gerakan Desa Membangun Tahun 2011-2016 (Luncuran)		1 Dokumen		1					1						1.00			
100	Jumlah Dokumen Operasional Gerdema		2 Dokumen			1	1	1	1		1	1				1.00	1.00	0.00	0.00

101	Pendampingan dan Pelatihan bagi tenaga penggerak Gerdema		1 Kali		1					1					1.00				
102	Jumlah Dokumen Operasional Gerdema		1 Dokumen			1					1					1.00			
103	Jumlah Dokumen Pencetakan Buku Pedoman Gerdema Edisi II		1 Dokumen			1					1					1.00			
XIII	EVALUASI PROGRAM GERDEMA PADA TINGKAT KECAMATAN DAN DESA																		
104	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Gerdema di Desa-desa		2 Dokumen		1	1				1	1				1.00	1.00			
105	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Gerdema di Desa-desa		1 Dokumen				1					1					1.00		
XIV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																		
106	Terfasilitasinya Program LP3MD		109 Desa				109	109	109			109	109	109			1.00	1.00	1.00
107	Terfasilitasinya Perencanaan Desa		1 kegiatan						1										0.00
XV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR																		
108	Jumlah SDM yang terlatih		54 Orang			54					54					1.00			
109	Persentase Peningkatan Kapasitas GIS BAPPEDA		84 Orang		24	24				24	24				1.00	1.00			
110	Jumlah Operator SIPPD SKPD yang terlatih		174 Orang		174					174					1.00				
111	Jumlah SDM Peneliti yang dilatih		12 Orang		1					1					1.00				
112	Jumlah SDM SKPD yang Terlatih Statistik dan Pelaporan		53 SKPD			53					53					1.00			
113	Jumlah Aparatur yang memahami Permendagri Nomor 54 Tahun 2010		54 Orang				54					54					1.00		
114	Jumlah personil terlatih Kompensasi Hak Anak		12 Orang				1	1	1			1					1.00	0.00	0.00
	PENUNJANG																		
XVI	PROGRAM PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																		
115	Jumlah Aset yang diperbaiki		42 Unit		12	10	10	8	8	12	10	8			1.00	1.00	0.80	0.00	0.00
116	Jumlah paket ATK yang tersedia		5 Paket		1	1	1	1	1	1	1	1			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

117	Jumlah dokumen yang gandakan		60 Dokumen		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
118	Jumlah Peralatan Kantor yang Tersedia		32 Unit		8	8	6	8	8	8	8	6	8	8	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
119	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional Bappeda		25 Kali		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
120	Jumlah Paket pelaksanaan Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi, dan Suvervisi dalam dan luar daerah		5 Paket		1	1	1	1	1	1	1	1			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Sumber : Subbag Penyusunan Program Bappeda dan Litbang

TABEL 2.6

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN MALINAU**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN	27,156,561,180	19,147,593,250	16,630,379,541	16,685,677,797	13,514,257,234	23,028,125,928	17,752,177,804	15,657,071,208	14,511,745,807	11,581,029,946	0.85	0.93	0.94	0.87	0.86	-0.153	-0.156
BELANJA																	
1. Belanja Tidak Langsung :																	
a. Belanja Pegawai	2,421,128,000	2,416,829,000	2,669,021,949	6,892,607,797	6,559,278,234	2,030,039,428	2,217,001,629	2,316,744,538	6,597,997,283	6,550,493,298	0.84	0.92	0.87	0.96	1.00	0.409	0.494
2..Belanja Langsung																	
a. Belanja Pegawai	24,735,433,180	16,730,764,250	13,961,357,592	9,793,070,000	6,954,979,000	20,998,086,500	15,535,176,175	13,340,326,670	7,913,748,524	5,030,536,648	0.85	0.93	0.96	0.81	0.72	-0.269	-0.293
b. Belanja Barang dan Jasa																	
c. Belanja Modal																	

Sumber : Subbag Penyusunan Program Bappeda dan Litbang

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda dan Litbang

Untuk dapat mewujudkan target tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dilakukan analisis berbagai faktor yang mendorong maupun yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang. Hasil analisis lingkungan strategis yang berdasarkan dari hasil perumusan dan pembahasan, maka dapat disampaikan gambaran analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang selanjutnya dilakukan penilaian serta penentuan prioritas. Dari hasil prioritas tersebut kemudian dilakukan analisis SWOT sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

Tabel 2.7
Analisis Lingkungan Internal (ALI) Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau

NO.	KEKUATAN(S)	NO.	KELEMAHAN (W)
1.	Tersedianya Tingkat pendidikan SDM yang memadai	1.	Kompetensi dan kuantitas pegawai perencana belum optimal
2.	Prasarana dan Sarana kerja cukup memadai	2.	Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan di daerah
3.	Peran Bappeda dan Litbang yang strategis dalam perumusan kebijakan	3.	Kualitas data dan sistem informasi belum optimal
4.	Akses terhadap informasi pembangunan tinggi	4.	Tatalaksana organisasi belum optimal
5.	Kemampuan menggalang partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan cukup memadai	5.	Sistem monitoring dan evaluasi belum optimal

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Tabel 2.8
Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau

NO.	PELUANG (O)	NO.	TANTANGAN (T)
1.	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan pengendalian pembangunan cukup tinggi	1.	Belum optimalnya pemahaman stakeholders dan OPD dibidang perencanaan pembangunan
2.	Koordinasi antar instansi terkait cukup tinggi	2.	Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin meningkat dan beragam
3.	Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak lain	3.	Pemanfaatan produk-produk perencanaan belum optimal
4.	Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan	4.	Munculnya beberapa perubahan kebijakan nasional yang mendadak dan berdampak pada kebijakan daerah sehingga menyebabkan timbulnya inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah
5.	Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas	5.	Peraturan perundang-undangan pemerintah sering tidak selaras

3. Analisis Strategi dan Pilihan

Strategi adalah kegiatan untuk mengantisipasi secara menyeluruh, meramalkan pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara Kekuatan dengan Peluang, Kekuatan dengan Ancaman, Kelemahan dengan Peluang, serta Kelemahan dengan Ancaman melalui metode analisa SWOT. Dengan demikian akan diperoleh berbagai pilihan strategi yang perlu diuji kembali dengan visi, misi dan nilai-nilai Organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau.

Tabel 2.9

Analisis Strategi alternative dan pilihan Dengan Analisis SWOT

FAKTOR EKSTERNAL	PELUANG (O)	TANTANGAN (T)
	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan pengendalian pembangunan cukup tinggi	Belum optimalnya pemahaman stakeholders dan OPD dibidang perencanaan pembangunan
	Koordinasi antar instansi terkait cukup tinggi	Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin meningkat dan beragam
	Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak lain	Pemanfaatan produk-produk perencanaan belum optimal
	Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan	Munculnya beberapa perubahan kebijakan nasional yang mendadak dan berdampak pada kebijakan daerah sehingga menyebabkan timbulnya inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah
	Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas	Peraturan perundang-undangan pemerintah sering tidak selaras
FAKTOR INTERNAL		
KEKUATAN (S)	S – O	S – T
Tersediannya Tingkat pendidikan SDM yang memadai	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan	Mendayagunakan kompetensi SDM di bidang perencanaan pembangunan untuk meningkatkan pemahaman stakeholders dan OPD dibidang perencanaan pembangunan
Prasarana Sarana dan prasarana kerja cukup memadai	Mendayagunakan SDM untuk meningkatkan koordinasi antar instansi terkait untuk meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan	Mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi Tuntutan dan aspirasi masyarakat
Peran Bappeda dan Litbang yang strategis dalam perumusan kebijakan	Memperkuat jejaring kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi serta dunia usaha dengan dukungan sarana dan prasarana kerja	Meningkatkan peran Bappeda dan Litbang yang strategis untuk mendorong OPD dalam memanfaatkan produk-produk perencanaan
Akses terhadap informasi pembangunan tinggi	Meningkatkan pemanfaatan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan informasi dalam perencanaan pembangunan	Mengoptimalkan akses informasi untuk mengantisipasi perubahan kebijakan nasional yang mendadak dan berdampak pada kebijakan daerah sehingga menyebabkan timbulnya inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah
Kemampuan menggalang partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan cukup memadai	Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran Bappeda dan Litbang yang strategis dengan menggalang pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan partisipatif	Mengoptimalkan Kemampuan menggalang partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi Peraturan perundang-undangan pemerintah sering tidak selaras
KELEMAHAN (W)	W – O	W – T
Kompetensi dan kuantitas pegawai perencana belum optimal	Mengoptimalkan kompetensi dan kuantitas pegawai perencana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan	Mengoptimalkan Kompetensi dan kuantitas pegawai perencana untuk meningkatkan pemahaman stakeholders dan OPD dibidang perencanaan pembangunan
Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan di daerah	Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah	Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk mengantisipasi Tuntutan dan aspirasi masyarakat
Kualitas data dan sistem informasi belum optimal	Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan	Mengoptimalkan Kualitas data dan sistem informasi untuk Pemanfaatn produk-produk perencanaan

Tatalaksana organisasi belum optimal	Meningkatkan kelengkapan tata laksana organisasi dengan kerjasama dan pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan	Menyediakan Tatalaksana organisasi untuk mengantisipasi Munculnya beberapa perubahan kebijakan nasional yang mendadak dan berdampak pada kebijakan daerah sehingga menyebabkan timbulnya inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah
Sistem monitoring dan evaluasi belum optimal	Mengoptimalkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui peningkatan koordinasi antar instansi	Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi untuk mengantisipasi Peraturan perundang-undangan pemerintah sering tidak selaras

4. Analisis Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan- pilihan strategi yang telah diuji dengan visi, misi dan nilai-nilai. Hasil kajian yang cermat dan teliti dari beberapa pilihan strategi menghasilkan Faktor Penentu Keberhasilan yang terdiri dari unsur internal dan eksternal, dimana kedua unsur tersebut saling mendukung dan tidak dapat berdiri sendiri.

Adanya faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya dorong yang besar untuk mewujudkan visi,dan misi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau.

Berdasarkan analisis dari hasil pembobotan berdasarkan metode profesional judgement maka terdapat 20 strategi pilihan atau Analisis Strategis Pilihan (ASP) sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Mendayagunakan SDM untuk meningkatkan koordinasi antar instansi terkait untuk meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan
3. Memperkuat jejaring kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi serta dunia usaha dengan dukungan sarana dan prasarana kerja

4. Meningkatkan pemanfaatan Perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan informasi dalam perencanaan pembangunan
5. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran Bappeda dan Litbang yang strategis dengan menggalang pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan partisipatif
6. Mendayagunakan kompetensi SDM di bidang perencanaan pembangunan untuk meningkatkan pemahaman stakeholders dan OPD dibidang perencanaan pembangunan
7. Mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi Tuntutan dan aspirasi masyarakat
8. Meningkatkan peran Bappeda dan Litbang yang strategis untuk mendorong OPD dalam memanfaatkan produk-produk perencanaan
9. Mengoptimalkan akses informasi untuk mengantisipasi perubahan kebijakan nasional yang mendadak dan berdampak pada kebijakan daerah sehingga menyebabkan timbulnya inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah
10. Mengoptimalkan Kemampuan menggalang partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi Peraturan perundang-undangan pemerintah sering tidak selaras
11. Mengoptimalkan kompetensi dan kuantitas pegawai perencana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan

12. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah
13. Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan
14. Meningkatkan kelengkapan tata laksana organisasi dengan kerjasama dan pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan
15. Mengoptimalkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui peningkatan koordinasi antar instansi
16. Mengoptimalkan Kompetensi dan kuantitas pegawai perencanaan untuk meningkatkan pemahaman stakeholders dan OPD dibidang perencanaan pembangunan
17. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk mengantisipasi Tuntutan dan aspirasi masyarakat
18. Mengoptimalkan Kualitas data dan sistem informasi untuk Pemanfaatn produk-produk perencanaan
19. Menyediakan Tatalaksana organisasi untuk mengantisipasi Munculnya beberapa perubahan kebijakan nasional yang mendadak dan berdampak pada kebijakan daerah sehingga menyebabkan timbulnya inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah
20. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi untuk mengantisipasi Peraturan perundang-undangan pemerintah sering tidak selaras

5. Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan

Dari hasil perumusan dan pembahasan pada analisis lingkungan internal maupun eksternal tersebut diatas, maka dapat disampaikan beberapa faktor Penentu Keberhasilan (FPK) sebagai berikut :

FPK I Meningkatnya koordinasi antar instansi melalui peran strategis Bappeda dan Litbang dalam perumusan kebijakan pembangunan

FPK II Meningkatnya kemampuan menggalang partisipasi masyarakat untuk penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat

FPK III Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan memanfaatkan tingkat pendidikan SDM

FPK IV Terlaksananya Optimalisasi akses informasi pembangunan dengan dukungan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan

FPK IV Meningkatnya jaringan kerjasama dengan pihak lain dengan memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana kerja

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SWOT sebagaimana pada Lampiran 2.1, maka dapat digambarkan posisi organisasi sebagaimana berikut.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAPPEDA DAN LITBANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda dan Litbang

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana Organisasi Bappeda dan Litbang menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Indikasi dari persoalan tersebut adalah kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini.

Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan sekedar kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda dan Litbang yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk

itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Pada kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan pokok antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar (shortcutting);
3. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
4. Kompetensi SDM perencana belum optimal;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan;
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
7. Belum lengkapnya Standard Operating Procedure (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel;
8. Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencana;
9. Belum optimalnya fungsi penelitian dalam menghasilkan kajian-kajian strategis;
10. Belum optimalnya pemanfaatan Dokumen Perencanaan yang

dihasilkan Bappeda dan Litbang;

11. Belum terbangunnya sistim informasi data pembangunan;
12. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
13. Belum optimalnya penelaahan usulan masyarakat oleh OPD;
14. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan dengan OPD sehingga terjadi ketidakselarasan output dan outcome yang dihasilkan;
15. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2016-2021 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN”**, berbasis pada posisi dan peran Bappeda dan Litbang dalam mendukung pencapaian misi kesatu, kedua, ketiga, keempat, keenam, kedelapan, kesembilan, kesebelas dan kedua belas yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau 2016-2021, sehingga misi-misi yang mejadi basis tersebut adalah Memantapkan implementasi 3 (tiga) program unggulan dan 13 (tiga belas) program utama daerah.

Berdasarkan tujuan dan misi RPJMD di atas, peran Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau yang strategis terdiskripsi secara jelas sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Bappeda dan Litbang. Kualitas birokrasi dan pengelolaan pembangunan dijabarkan dalam cara pandang dalam pengelolaan perencanaan pembangunan yang partisipatif, akomodatif, efektif dan efisien. Dengan visi ini diharapkan kualitas pengelolaan pembangunan di Kabupaten Malinau terutama ditinjau dari aspek perencanaan lebih meningkat dan menjadi lebih baik dari waktu sebelumnya.

Adapun langkah yang perlu dilaksanakan untuk mencapai visi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau dengan menentukan misi berupa:

1. Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif.

2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Visi dan misi Bappeda dan Litbang terjabar dalam program yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD, program dan kegiatan dimaksud adalah :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Perencanaan Tata Ruang
- Program Pemanfaatan Ruang
- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Program Pengembangan data dan Informasi
- Program Kerjasama Pembangunan
- Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- Program perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- Program Perencanaan Sosial Budaya
- Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi,
Misi dan Program Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)				
NO.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<u>Misi 1 :</u> <u>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja trampil dan terdidik</u>	Layanan data dan informasi pembangunan	Belum seluruh jenis data pada profil data dapat terisi	Adanya dokumen data pembangunan
	<i>Program perencanaan sosial budaya</i>	Layanan perijinan, PKL dan Penelitian	Kepuasan terhadap fasilitas dan kenyamanan ruang masih kurang	Sudah tersedianya SOP untuk PKL dan Penelitian serta fasilitas internet gratis
	<i>Program pengembangan data/informasi</i>			
	<i>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</i>			
	<i>Program Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Bappeda dan Litbang, Kepegawaian dan Persandian</i>			
	<u>Misi 2 :</u> <u>Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi,</u>	Layanan data dan informasi pembangunan bidang sosial budaya	Belum seluruh jenis data pada profil data sosial budaya dapat terisi	Sudah terbangun sistem informasi profil data pembangunan secara online

	<u>pertanggungjawaban, dan evaluasi</u>			
	<i>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Pendampingan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ke OPD	Belum ada instrument yang baku dan jelas dalam menganalisis korelasi antara program yang satu dengan program lainnya dalam mendukung pencapaian sasaran maupun misi daerah	Sudah terbangun e-planning melalui sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
	<i>Program Perencanaan Tata Ruang</i>			
	<u>Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, pedalaman maupun perbatasan dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu : jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi</u>	Layanan data dan informasi pembangunan bidang ekonomi	Belum seluruh jenis data pada profil data bidang ekonomi dapat terisi	Sudah terbangun Sistem informasi profil data pembangunan secara online
	<i>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Layanan data dan informasi pembangunan infrastruktur	Belum dilegalisasi rencana detail tata ruang	Terestrukturisasi organisasi Bappeda dan Litbang sehingga menjadi lebih fokus
	<i>Program Pengembangan data/informasi</i>		Belum tersedianya data bahan perencanaan secara lengkap	Sudah adanya system berbasis Citra dan kajian rencana rinci
	<i>Program perencanaan</i>			

	prasarana wilayah dan sumber daya alam			
	Program Perencanaan Tata Ruang			
	<u>Misi 4 : Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan</u>	Layanan data dan informasi bidang ekonomi dan sosial budaya	Belum seluruh jenis data pada profil data bidang ekonomi dapat terisi	Sudah terbangun Sistem informasi profil data pembangunan secara online
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			
	Program Perencanaan Sosial Budaya			
	<u>Misi 6 : Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan pusat perdagangan dan pusat industri barang dan jasa</u>	Layanan data dan informasi pembangunan	Belum tersedianya dokumen perencanaan kawasan strategis	Tersedianya aplikasi geografi informasi sistem (GIS)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
	Program perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			
	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam			
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar			
	Program Perencanaan Tata Ruang			
	Program Pemanfaatan Ruang			
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
	Misi 8 :	Layanan data	Belum adanya	Adanya bidang

	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: “Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun	dan informasi pembangunan	kajian secara khusus	kelitbangan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam			
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			
	Program Kerjasama Pembangunan			
	Program Perencanaan Tata Ruang			
	Program Pemanfaatan Ruang			
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
	<u>Misi 9 :</u> <u>Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)</u>	Layanan administrasi perkantoran	Belum disesuaikan ketata laksanaan panduan kerja sesuai dengan perubahan OPD	Tersedianya dokumen SOP sebelum perubahan OPD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	Program Peningkatan			

	<i>Kapasitas Sumberdaya Aparatur</i>			
	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>			
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>			
	<i>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</i>			
	<i>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</i>			
	<i>Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya</i>			
	<i>Program Pengembangan Data dan Informasi</i>			
	<i>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</i>			
	<i>Program Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar</i>			
	<i>Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah</i>			
	<u>Misi 11 :</u> <u>Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah</u>	Layanan data dan informasi dibidang social budaya	Belum semua data profil potensi terinventarisasi	Adanya tupoksi bidang di Bappeda dan Litbang yang secara khusus menangani
	<i>Program Perencanaan Sosial Budaya</i>			
	<u>Misi 12 :</u> <u>Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten,</u>	Layanan data dan informasi pembangunan	Belum semua desa memiliki batas wilayah	Sudah adanya system berbasis Citra

	<u>Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat</u>	daerah	yang final	
	<i>Program perencanaan pembangunan daerah</i>			
	<i>Program Perencanaan Sosial Budaya</i>			

Sumber : Subbidang Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan Litbang Bappeda dan Litbang

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Institusi perencana, baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, yang melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan, dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasar hal tersebut, maka penentuan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran institusi perencana pembangunan harus selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, sebagai institusi perencana di daerah, menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan Bappenas, sebagai institusi perencana di tingkat pusat.

Dalam rangka mengintegrasikan, dan mensinergikan perencanaan antara pusat dan daerah maka diperlukan penyandingan antara sasaran pada Renstra KL, yaitu Bappenas dan Renstra Provinsi, yaitu Bappeda dan Litbang KALTARA sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Sasaran Dalam Renstra Bappenas, Bappeda dan Litbang KALTARA dan Bappeda dan Litbang Malinau

SASARAN BAPPENAS	SASARAN BAPPEDA KALTARA	SASARAN BAPPEDA DAN LITBANG MALINAU	PERMASALAHAN
Tercapainya integrasi, Sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan	BELUM TERSEDIA	Meningkatnya kualitas Perencanaan pembangunan daerah	Adanya potensi perbedaan arah kebijakan program pembangunan mengingat periodisasi yang berbeda-beda antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten
	BELUM TERSEDIA	Meningkatnya kualitas Pengendalian pembangunan daerah	Perbedaan nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pusat dengan yang dilaksanakan oleh Provinsi dan Kabupaten
	BELUM TERSEDIA	Meningkatnya kualitas evaluasi pembangunan daerah	
	BELUM TERSEDIA	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Keterlambatan penyajian data statistik karena menunggu hasil SUSENAS yang tersedia

			mendekati akhir tahun anggaran
Meningkatnya peran Kementrian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya.	BELUM TERSEDIA	Meningkatnya kualitas Perencanaan pembangunan daerah	Adanya perbedaan persepsi tentang potensi daerah sehingga pembangunan masih terpusat pada daerah-daerah tertentu
Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	BELUM TERSEDIA	Meningkatnya kualitas layanan	Masih lemahnya monitoring dan evaluasi Terhadap pelaksanaan
			Masih terbatasnya dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan SOP

Sumber : Bappenas, Bappeda & Litbang Provinsi dan Bappeda & Litbang Malinau

Secara umum, telah ada keselarasan antar sasaran dari instansi Pusat, maupun Kabupaten, kecuali Provinsi karena Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara masih dalam proses penyusunan. Lebih lanjut sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target per tahunnya.

Dalam upaya pencapaian sasaran, dijalankan program dan kegiatan. Sinergi program dan kegiatan Pemerintah Pusat sebagaimana disusun oleh Bappenas, Pemerintah Provinsi oleh Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Malinau yang disusun oleh Bappeda dan Litbang masih memiliki permasalahan sebagaimana tersebut diatas.

Namun dalam pelaksanaannya sinergitas program dan kegiatan Pemerintah Pusat sebagaimana disusun oleh Bappenas dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Malinau

yang disusun oleh Bappeda dan Litbang masih terdapat kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategi, yaitu:

1. Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
2. Masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia perencana pembangunan di daerah.
3. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan penafsiran yang beragam. Hal ini menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antar daerah serta antara pusat dan daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang wilayah Kabupaten Malinau bertujuan untuk mengembangkan struktur dan pola ruang Kabupaten Malinau agar mampu mendukung perkembangan pariwisata, pendidikan, pertanian, industri kecil dan menengah, serta menjadikan rumah sakit umum daerah sebagai rumah sakit rujukan dalam rangka terwujudnya masyarakat Kabupaten Malinau yang maju dan sejahtera melalui gerakan desa membangun.

Permasalahan di bidang penataan ruang antara lain: (1) belum lengkapnya peraturan perundangan pelaksanaan penataan ruang di daerah; (2) rencana tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan sektor; (3) masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang; dan (4) masih lemahnya

kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Bappeda dan Litbang sesuai dengan tugas dan fungsinya berkewajiban mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup. Melalui program dan kegiatan yang ada dilakukan penyusunan dokumen tata ruang dan dokumen perencanaan yang terkait dengan lingkungan hidup yang akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan penataan ruang tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Umum Penataan Ruang, Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan penetapan Kawasan Strategis.

3.4.1. Kebijakan Umum Penataan Ruang

1. Kebijakan pengembangan struktur ruang, meliputi
 - a. Kebijakan pengembangan sistem perkotaan:
 - 1) Pengintegrasian kawasan perkotaan Kabupaten Malinau di sekitar Kawasan Perkotaan Malinau; dan
 - 2) Pengembangan kawasan perkotaan sebagai kawasan perkotaan mandiri melalui pemantapan Ibukota Kabupaten Malinau sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan perkotaan ibukota kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Lokal dan atau Pusat Pelayanan Kawasan.
 - b. Kebijakan pengembangan sistem perdesaan, berupa pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai pusat pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan sesuai dengan jangkauan pelayanannya.
2. Kebijakan pengembangan pola ruang, meliputi

- a. Kebijakan pengembangan kawasan lindung:
 - 1) Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - 2) Pembatasan kegiatan budidaya di kawasan lindung.
- b. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya:
 - 1) Perwujudan kawasan budidaya yang mampu memberikan tempat bermukim dan lingkungan yang layak; dan
 - 2) Peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya
sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- 3. Kebijakan pengembangan kawasan strategis, meliputi
 - a. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis untuk mendukung perekonomian daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing; dan
 - b. Pembatasan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan strategis.

3.4.2. Rencana Struktur Ruang Wilayah

- 1. Sistem Pusat Pelayanan, meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Ibukota Kabupaten Malinau yang meliputi seluruh wilayah Kecamatan Malinau;
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional meliputi Ibukota Kecamatan Pujungan, Sungai Boh dan Kayan Hulu;
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi seluruh pusat pemerintahan Ibukota Kecamatan diluar PKW, PKL dan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi seluruh

pusat pemerintahan desa yang tidak tercakup di dalam PKN, PKW, PKL, dan PPK.

2. Sistem Jaringan Prasarana, meliputi:

a. Sistem jaringan transportasi;

1) Sistem jaringan transportasi darat

- Jaringan jalan; adalah jaringan jalan umum yang mengemban fungsi jalan arteri, kolektor dan jalan local
- Sistem transportasi darat; meliputi sistem jaringan transportasi penumpang dan sistem jaringan transportasi barang

2) Sistem jaringan transportasi udara

b. Sistem jaringan prasarana energy

c. Sistem jaringan telekomunikasi

d. Sistem jaringan prasarana sumber daya air,

1) Jaringan air bersih

2) Jaringan sungai/ air permukaan

3) Jaringan irigasi

e. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan,

1) Unit pengolahan air minum,

2) Sistem pengelolaan prasarana drainase,

- Pengembangan sistem pengelolaan prasarana drainase secara terpadu pada kawasan perkotaan Kabupaten Malinau yang berada di dalam Kawasan Perkotaan Malinau;
- Pengembangan sistem pengelolaan prasarana drainase yang berwawasan lingkungan

3) Sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah,

- Pengembangan sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah secara terpadu pada

kawasan perkotaan Kabupaten Malinau yang berada di dalam Kawasan Perkotaan;

- Pengembangan instalasi pengolah limbah domestik dengan sistem komunal pada kawasan permukiman dan perumahan.

4) Sistem pengelolaan prasarana pengolah sampah.

- Pengembangan tempat penampungan sementara;
- Pengembangan tempat pengolah sampah terpadu;
- Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

3.4.3. Pola Ruang Wilayah

1. Kawasan Lindung

a. Kawasan lindung setempat

1) Sempadan sungai

b. Kawasan lindung pelestarian alam dan cagar budaya

1) Kawasan pelestarian alam; adalah kawasan Taman Nasional

2) Kawasan lindung cagar budaya

c. Kawasan rawan bencana

2. Kawasan Budidaya

a. Kawasan peruntukan pertanian

b. Kawasan peruntukan pertambangan;

- Pasir dan kerikil

c. Kawasan peruntukan industry

d. Kawasan permukiman

e. Kawasan peruntukan pariwisata

f. Kawasan hutan; kawasan hutan

g. Kawasan pertahanan dan keamanan

- Batalyon Infanteri

3.4.4. Kawasan Strategis Wilayah

1. Kawasan strategis pertahanan keamanan
2. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - a. Kawasan fungsi keamanan dan ketahanan pangan
 - b. Kawasan Perkotaan
3. Kawasan strategis sosial dan budaya
4. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; meliputi Kawasan Taman Nasional

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032 . Perda tersebut ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Malinau dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, dan berkelanjutan.

Tabel 3.3

Telaahan RTRW Terkait Pelayanan Bappeda dan Litbang

TELAHAAN	IMPLIKASI TERHADAP PELAYANAN BAPPEDA	FAKTOR	
		PENDORONG	PENGHAMBAT
Implikasi RTRW	Permohonan rekomendasi tata ruang dari masyarakat belum sepenuhnya berpedoman pada dokumen RTRW	Bappeda selaku sekretariat BKPRD mempunyai kewenangan dalam mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang	Belum ditetapkannya peraturan daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang
			Masih belum padunya antara RTRW Kabupaten Malinau dengan Peraturan di bidang kehutanan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Bappeda berdasarkan Analisis KLHS

Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Pelayanan OPD	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
Pelaksanaan program perencanaan tata Ruang mempertimbangkan penyesuaian alokasi ruang dengan daya dukung dan daya tampung	Layanan informasi penataan ruang	Adanya perbedaan status wilayah yang diatur dalam Perda RTRW dengan Peraturan Menteri Kehutanan	Sudah adanya system berbasis Citra dan kajian rencana rinci
		Sulitnya proses alih fungsi kawasan di Kementerian Kehutanan	

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis pada lingkup Internasional, Nasional, Regional termasuk Isu daerah. Bappeda dan Litbang sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis

isu strategis tersebut merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang, beberapa isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan di dalam menyusun Renstra Bappeda dan Litbang adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme perencanaan belum berjalan lancar;
2. Kebijakan pusat yang sering berubah-ubah dalam perencanaan pembangunan daerah;
3. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan dan tingkatan belum optimal;
4. Pengaruh dan dampak globalisasi yang sering sulit diprediksi;
5. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan OPD sehingga terjadi ketidakselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah;
6. Kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan layanan;
7. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan;
8. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan.

Berbagai isu strategis tersebut, sangat diperlukan didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan di daerah, terutama didalam merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diinginkan lima tahun kedepan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda dan Litbang diharapkan akomodatif, responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali

dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan sampai tingkat desa, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya sikap yang arif dan cerdas agar pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang berlaku.
2. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Perlu adanya panduan terhadap sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
5. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
7. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang.
8. Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang sistematis dan akurat, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.
9. Tersedianya ketatalaksanaan perencanaan pembangunan.
10. Meningkatkan peran fungsi penelitian untuk menghasilkan kajian-kajian strategis.

11. Optimalnya pemanfaatan Dokumen Perencanaan yang dihasilkan Bappeda dan Litbang

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Malinau perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Malinau untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang akan datang yang akan berpengaruh langsung pada tujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang. serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya

Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda dan Litbang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Bappeda dan Litbang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan yang komprehensif dan implementatif	Adanya dokumen perencanaan sebagai acuan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perbup: - RPJPD - RPJMD - RKPD - RENSTRA OPD - RENJA OPD - KUA PPAS	Ada Ada Ada Ada Ada Ada	Ada Ada Ada Ada Ada Ada	Ada Ada Ada Ada Ada Ada	Ada Ada Ada Ada Ada Ada	Ada Ada Ada Ada Ada Ada
			Frekuensi penyelenggaraan forum perencanaan interaktif dan penjangkaran aspirasi masyarakat.(kali)	3	3	3	3	4
			Prosentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan (%)	65	70	75	80	85
			Prosentase program/kegiatan Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD (%)	80	80	85	85	90
			Prosentase pelaksanaan program/ kegiatan yang tepat waktu dan tepat sasaran (%)	100	100	100	100	100
		Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	Adanya hasil kajian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral/bidang (ada/tdk)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	2. Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan data dan informasi pembangunan	Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat	Ketersediaan jenis data/informasi bidang pembangunan (bidang)	6	6	6	6	6
			Adanya data dan informasi perencanaan pembangunan (ada/tdk): - Inflasi - IPM - Indeks Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) - IPG - Gini Ratio - Data Pembangunan Daerah	Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada	Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada	Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada	Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada	Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
	3 Meningkatkan manajemen dan sistem informasi pengelolaan data/ informasi yang terpadu	Meningkatnya efektifitas sistem informasi data yang terpadu	Jenis system informasi pengelolaan data/informasi (jenis/jml)	3	3	3	3	3
			Kecepatan akses data dan informasi (jam)	2	2	1	1	1
	4 Membina dan mengembangkan	Meningkatnya kualitas dan	Prosentase pegawai yang telah memiliki	70	70	75	75	80

	SDM perencana yang berkualitas	profesionalisme SDM perencana	kemampuan teknis perencanaan (%)					
			Prosentase peningkatan jenjang pendidikan formal (%)	4	4	4	4	4
	5 Meningkatkan pelayanan prima	Meningkatnya fasilitas pendukung perencanaan	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan (%)	70	70	80	80	85
			Tersedia dan terimplementasikannya SOP - jenis - implementasi	13 10	13 10	13 11	14 11	14 11

Sumber : Subbag Penyusunan Program

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Arah kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, berikut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Malinau

Visi : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun			
Misi 2 : Meningkatkan peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari Fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi.			
Misi 9 : Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien Guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	1. Tersedianya dokumen perencanaan yang komprehensif dan implementatif. 2. Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.	1. Meningkatkan pelaksanaan analisis, pengkajian dan perumusan kebijakan strategis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bersifat lintas dimensi. 2. Melibatkan seluruh komponen pelaku pembangunan dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. 3. Meningkatkan kualitas kajian sebagai bahan perencanaan pembangunan.	1. Meningkatkan kualitas kajian sebagai bahan perencanaan pembangunan. 2. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan peningkatan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. 3. Peningkatan sinkronisasi dan sinergisme hasil kajian terhadap perencanaan pembangunan daerah.
Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdataran maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi.			
1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan	1. Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat.	1. Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi bahan perencanaan pembangunan yang akurat dan cepat. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dan pengembangan manajemen pengelolaan data dan informasi.	1. Membangun dan mengembangkan pusat data dan informasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan tata ruang. 2. Peningkatan kualitas data pembangunan melalui pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi serta pemantapan manajemen pengelolaan data.
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik.			
Misi 12 : Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.			
1. Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan umum	1. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana.	1. Meningkatkan potensi dan kompetensi SDM perencana.	1. Meningkatkan potensi dan kompetensi SDM perencana.

bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	2.Meningkatnya fasilitas pendukung perencanaan.	2.Pengembangkan kapasitas mekanisme kerja.	2.Membangun dan mengembangkan sarana prasarana institusi perencanaan.
---	--	--	--

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang. Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Bappeda dan Litbang
(Dalam Format Excel)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Bappeda dan Litbang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah dan litbang. Berdasar urusan dan program yang

dilaksanakan, Bappeda mendukung pencapaian 5 (lima) misi Kabupaten Malinau yang tercantum pada RPJMD yaitu :

- a. **Misi 1** : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja trampil dan terdidik.
- b. **Misi 2** : Meningkatkan peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi.
- c. **Misi 3** : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, pedalaman maupun perbatasan dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu : jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi.
- d. **Misi 9** : Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- e. **Misi 12** : Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja sasaran Bappeda dan Litbang sebanyak 25 (dua puluh lima) indikator yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Indikator kinerja yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD sebanyak 6 (enam) indikator yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kabupaten Malinau 2016 – 2021

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Indeks kepuasan masyarakat	80	83,2	86,53	89,99	93,59	97,33	97,33
5.	Buku Profil Daerah	1	1	1	1	1	1	1
6.	Buku Data Pembangunan Kabupaten Malinau	1	1	1	1	1	1	1

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Bappeda dan Litbang, telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut.

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021

NO.	IKU	CARA PENGHITUNGAN	TARGET					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Predikat (Nilai) Sakip Bappeda dan Litbang	Predikat atau nilai atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh inspektorat	A (4)	A (4)	A (4)	A (4)	A (4)	A (4)
2.	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target	Jumlah indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target dibagi jumlah seluruh indikator kinerja sasaran daerah kali 100% (Indikator kinerja sasaran daerah adalah sebagaimana yang tercantum dalam dokumenn RPJMD)	75%	80%	85%	90%	95%	95%
3.	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	Jumlah kegiatan dan atau output kegiatan usulan masyarakat yang tercantum di berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD di Kecamatan yang masuk di APBD dibagi Jumlah kegiatan dan atau output kegiatan usulan masyarakat yang tercantum di berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD di Kecamatan kali 100%	80%	82%	84%	86%	88%	88%
4.	Persentase capai program daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi	Jumlah OPD dengan hasil renja predikat kinerja tinggi dibagi jumlah seluruh OPD kali 100%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
5.	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi seluruh temuan hasil pemeriksaan kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Bappeda dan Litbang	Jumlah pengguna layanan yang puas dibagi jumlah seluruh pengguna layanan yang di survey kali 100%	81,70 %	81,75 %	81,80 %	81,85 %	81,95 %	82%
7.	Persentase realisasi indikator sasaran strategis penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD) yang mencapai target	Jumlah indikator sasaran SPKD yang mencapai target dibagi jumlah seluruh indikator sasaran SPKD kali 100%	70%	71%	72%	73%	74%	75%

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah OPD, memuat antara lain visi daerah, misi daerah, tujuan dan sasaran OPD, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021. Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bappeda dan Litbang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi.

Selanjutnya Perubahan Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Bappeda dan Litbang setiap tahunnya. Rencana Kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Bappeda dan Litbang yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Bappeda dan Litbang).

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN MALINAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun (2016) Awal Perencanaan (Juta)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
						Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3		5	6	7		8		9		10		11		12		13
Tujuan 1			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG															
	Sasaran 1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang Memperoleh Pelayanan Administrasi	1,034,190,000	100%	651,691,000	100%	524,420,469	100%	1,933,068,729	100%	1,461,390,000	100%	1,485,680,000	100%	6,056,250,198	Bappeda & Litbang
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki di masing-masing bidan	-		20,000,000		10,000,000		-		10,000,000		20,000,000		60,000,000	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terakomodirnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	150,000,000		90,691,000		75,000,000		77,178,736		71,390,000		75,000,000		389,259,736	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	75,000,000		30,000,000		30,000,000		10,000,000		20,000,000		30,680,000		120,680,000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Kerja Perkantoran	-		-		50,000,000		150,000,000		50,000,000		50,000,000		300,000,000	
			Penyedian Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum	-		11,000,000		9,420,469		35,000,000		10,000,000		10,000,000		75,420,469	
			Rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya Laporan Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Konsultasi	809,190,000		500,000,000		350,000,000		660,889,993		500,000,000		500,000,000		2,510,889,993	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD Pengelola Kegiatn DAK, Bankeu, Dekon dan TP	Tersedianya Laporan Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Konsultasi	-		-		-		1,000,000,000		800,000,000		800,000,000		2,600,000,000	
	Sasaran 2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	75,000,000	100%	65,819,650	100%	45,000,000	100%	120,000,000	100%	45,000,000	100%	50,000,000.00	100%	325,819,650	Bappeda & Litbang
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional yang Memadai	75,000,000		65,819,650		45,000,000		120,000,000		45,000,000		50,000,000		325,819,650	
	Sasaran 3		Program pengembangan data/informasi daerah	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	469,611,000	100%	515,300,000	100%	260,000,000	100%	250,000,000	100%	200,000,000	100%	300,000,000	100%	1,525,300,000	Bappeda & Litbang
			Penyusunan Profile Daerah Kabupaten Malinau	Tersedianya Buku Profil Daerah	173,200,000		171,250,000		100,000,000		150,000,000		100,000,000		100,000,000		621,250,000	

			Penyusunan LKPJ Bupati Malinau Tahunan	Tersedianya Buku LKPJ Bupati Malinau	146,861,000		132,550,000		130,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		562,550,000	
			Penyusunan LKPJ Bupati Malinau Akhir Masa Jabatan	Jumlah Buku LKPJ AMJ									100,000,000					
			Penyusunan Profile Daerah (2016)	Tersedianya Buku Profil Daerah			25,650,000		-		-		-		-		25,650,000	
			Pengadaan dan Upgrade Perlengkapan Pemetaan Spasial	Tersedianya Peralatan Pemetaan			30,000,000										30,000,000	
			Penyusunan Data Pembangunan Daerah				155,850,000										155,850,000	
			Dokumentasi Penginderaan Jauh Ibu Kota Kecamatan	Tersedianya Data Spasial Eksisting yang Terbaharui pada Ibu Kota Kecamatan yang Belum Tercover Photo Udara	149,550,000		-		30,000,000		-		-		-		30,000,000	
	Sasaran 4		Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Presentase Data Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	-	0%	-	100%	11,608,636,000	100%	7,077,100,000	100%	600,000,000	0%	1,000,000,000	100%	20,285,736,000	Bappeda & Litbang
			Study Kelayakan dan Masterplan Kota Mandiri Kabupaten Malinau		-		-		171,161,511								171,161,511	
			Study Kelayakan Ibu Kota Malinau Menjadi Kota Mandiri	Tersusunnya Dokumen Study Kelayakan dan Masterplan	-		-		328,838,489		-		-		-		328,838,489	
			Updating Dokumen RPIJM Keciaptakaryaan	Tersedianya Updating Dokumen RPIJM Keciaptakaryaan	-		-		-		50,000,000		-				50,000,000	
			Master plan Ibu Kota malinau menjadi Kota Mandiri	Dokumen Master Plan Ibu Kota Malinau									300,000,000.00					
			Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Jaringan Jalan Kab. Malinau	Dokumen Inventaris Jalan dan jembatan									200,000,000.00					
			Penyusunan kajian Koefisien Wilayah Terbangun di Kab. Malinau	Dokumen Kajian Koefisien Wilayah											300,000,000.00			
			Penyusunan KLHS Ibu Kota Malinau menjadi Kota Mandiri	Dokumen KLHS Ibu Kota Malinau Menjadi Kota Mandiri									100,000,000.00					
			Penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Kebakaran Kawasan Perkotaan Kab. Malinau	Dokumen RIPKA											300,000,000.00			
			Penyusunan Dokumen RPPLH	Dokumen RPPLH Kab. Malinau											400,000,000.00			
			Review Master Plan Telekomunikasi Kab Malinau	Dokumen Master Plan Telekomunikasi											-			
	Sasaran 5		Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan Daerah	Jumlah Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan daerah	-	0%	-	100%	60,000,000	100%	500,000,000	0%	-	0%	-	100%	560,000,000	Bappeda & Litbang

			Koordinasi Kegiatan Tim Koordinasi Kabupaten dan TIM Distric Proje Management Unit (DPMU) Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Tersusunnya RAD terkait Air Minum	-		-	30,000,000		-		-		-		30,000,000		
			Koordinasi Strategi Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP/RP2KP)	Tersusunnya RAD Keciaptakaryaan	-		-	30,000,000		-		-		-		30,000,000		
			Penyusunan Dokumen Moda Transportasi	Tersedianya Dokumen Moda Transportasi	-		-	-		500,000,000		-		-		500,000,000		
	Sasaran 6		Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana Jangka Menengah Daerah dengan realisasi tahunan	1,612,913,000	100%	1,201,050,000	100%	4,914,318,000	100%	1,703,550,000	100%	2,175,000,000	100%	2,100,000,000	100%	12,093,918,000	Bappeda & Litbang
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda)	Tersedianya Dokumen untuk Penyusunan RKPD Kabupaten Malinau	595,950,000		493,890,000		600,000,000		600,000,000		500,000,000		500,000,000		2,693,890,000	
			Penyusunan KUA,PPAS-Perubahan dan KUA, PPAS	Tersusunnya Dokumen Sebagai Dasar Penyusunan RAPBD	336,350,000		297,150,000		291,738,000		228,550,000		250,000,000		250,000,000		1,317,438,000	
			Rapat Koordinasi Bappeda dan Litbang Se-Provinsi Kalimantan Utara	Terkoordinirnya Perencanaan Pembangunan di Kalimantan Utara	53,310,000		148,690,000		75,000,000		75,000,000		250,000,000		125,000,000		673,690,000	
			Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan RKPD	131,300,000		195,920,000		250,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		1,045,920,000	
			Koordinasi dan Monitoring Kegiatan APBN dan Bantuan Keuangan Provinsi	Tersedianya Buku Koordinasi dan Monitoring Kegiatan DAK, Bantuan Keuangan Provinsi	-		65,400,000		-		-		-		-		65,400,000	
			Koordinasi Kegiatan DAK, Bantuan Keuangan Provinsi dan TEPR	Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengendalian Dokumen Perencanaan Tahunan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA)	-		-		150,000,000		-		-		-		150,000,000	
			Monitoring Evaluasi Dana DAK, Bantuan Keuangan, TP dan TEPR	Tersedianya Dokumen Laporan Kegiatan Monev, DAK, Bankeu dan TEPR	-		-		-		150,000,000		150,000,000		150,000,000		450,000,000	
			Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Dokumen Perencanaan Tahunan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA)	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahunan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA)	-		-		150,000,000		-		-		-		150,000,000	

			Pembentukan Lembaga dan Forum CSR Kabupaten Malinau	Tersusunnya Dokumen Kelembagaan Tentang CSR	-		-	200,000,000		-		-		-	200,000,000			
			Pengadaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-		-	800,000,000		-		-		-	800,000,000			
			Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Data Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-		-	-	300,000,000		150,000,000			-	450,000,000			
			Kajian Kebutuhan Buku Wajib Belajar Jenjang PAUD, SD, SMP di Kabupaten Malinau	Tersedianya Kajian Kebutuhan Buku Wajib Belajar Jenjang PAUD,SD, SMP, di Kabupaten Malinau	-		-	150,000,000		-		-		-	150,000,000			
			Penyusunan RPJMD Perubahan	Tersedianya Dokumen RPJMD Perubahan	-		-	310,200,000		-		-		-	310,200,000			
			Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Tersedianya Dokumen RPJMD	496,003,000		-	-		-		-		-	-			
			Kajian Optimalisasi Dana Transfer Daerah Dalam Percepatan Pembangunan Kabupaten Perbatasan dan Konservasi	Tersedianya Kajian Optimalisasi Dana Transfer Daerah	-		-	1,937,380,000		-		-		-	1,937,380,000			
			Perencanaan dan Penyusunan Usulan Inovasi Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penyusunan Usulan Inovasi Daerah	-		-	-	75,000,000		-			-	75,000,000			
			Pengembangan Jaringan Internet Data Spasial	Tersedianya Akses Jaringan yang memadai	-		-	-	75,000,000		75,000,000		75,000,000		225,000,000			
			Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2022 s/d 2027	Tersedianya Dokumen Teknokratik RPJMD							400,000,000							
			Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD 2022 s/d 2027	Tersedianya Dokumen KLHS RPJMD							100,000,000							
			Penyusunan RPJMD 2022 s/d 2027	Tersedianya Dokumen RPJMD									400,000,000					
			Evaluasi Renstra dan RPJMD 2016 s/d 2021	Tersedianya Dokumen Evaluasi									300,000,000					
			Evaluasi Hasil RENJA Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Renja PD							100,000,000		100,000,000					
	Sasaran 7		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana Jangka Menengah Daerah dengan realisasi tahunan di bidang ekonomi	218,300,000	100%	378,000,000	100%	230,000,000	100%	525,000,000	100%	300,000,000	100%	600,000,000	100%	2,033,000,000	Bappeda & Litbang

[illegible]

			Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	-		99,450,000		50,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		599,450,000	
			Monitoring Evaluasi Inovasi Pendidikan	Tersusunnya Laporan Monitoring Evaluasi Inovasi Pendidikan	-		-		-		-		-		-		-	
			Pemuktahiran Data dan Informasi Rumah Tangga Miskin	Tersedianya Data dan Informasi untuk Perencanaan dan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	392,900,000		740,680,000		195,480,000		-		-		-		936,160,000	
			Monitoring Evaluasi dan Identifikasi Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Sosial	Tersusunnya Laporan Monitoring Evaluasi dan Identifikasi Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Sosial	-		-		-		-		-		100,000,000		100,000,000	
			Pengendalian Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (RAD-PPK)	Tersedianya Laporan RAD-PPK Kabupaten Malinau	-		50,000,000		4,520,000		-		-		-		54,520,000	
			Monitoring Stunting Kabupaten Malinau	Tersusunnya Laporan Monitoring Stunting di Kabupaten Malinau	-		-		-		-		50,000,000		50,000,000		100,000,000	
			Monitoring RAD TB Kabupaten Malinau	Tersedianya Laporan RAD-PPK Kabupaten Malinau	-		-		-		-		50,000,000		50,000,000		100,000,000	
			Penyusunan Laporan TPB/ SDGs	Tersusunnya Laporan TPB/ SDGs	-		-		-		100,000,000		50,000,000		50,000,000		200,000,000	
			Advokasi dan Fasilitasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Tersedianya Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	-		-		-		230,000,000		-		-		230,000,000	
			Koordinasi, Konsultasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Tersedianya Data Bidang Sosial Budaya	-		-		-		180,000,000		150,000,000		125,000,000		455,000,000	
	Sasaran 9		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dalam pembangunan	-	100%	371,150,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	371,150,000	Bappeda & Litbang
			Penyusunan Pedoman Program Unggulan Daerah (2016)				145,000,000		-		-		-		-		145,000,000	
			Pengadaan Sarana Kantor Sekretariat LP3MD (2016)				198,000,000		-		-		-		-		198,000,000	
			Peningkatan Partisipasi Perencanaan Desa (2016)				28,150,000		-		-		-		-		28,150,000	
	Sasaran 10		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Tingkat Pengembangan dan pemanfaatan prasarana wilayah dan sumber daya alam	-	0%	-	100%	100,000,000	0%	-	0%	600,000,000	0%	150,000,000	100%	850,000,000	Bappeda & Litbang
			Peyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian	Tersedianya Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Sentra Pertanian	-		-		100,000,000		-		-		-		100,000,000	

		Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Tersedianya Data Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	-		-		-		250,000,000		200,000,000		150,000,000		600,000,000	
		Penyusunan Rencana Induk Kawasan Perbatasan	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Kawasan Perbatasan	-		-		-		-		400,000,000.00		-		400,000,000	
	Sasaran 11	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pelanggaran tata ruang	-	0%	72,550,000	100%	-	0%	-	0%		0%		100%	72,550,000	Bappeda & Litbang
TOTAL				4,163,364,000	64	4,145,690,650	91	17,992,374,469	73	12,768,718,729	64	5,831,390,000	55	6,210,680,000	100	46,948,853,848	

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

5,761,250,000

(7,007,468,729.00)

400,000,000.00

500,000,000.00

150,000,000

-

Tabel 6.1

KABUPATEN MALINAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun (2016) Awal Perencanaan (Juta)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		5	6	7		8		9		10		11		12		13
Tujuan 1				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG														
	Sasaran 1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang Memperoleh Pelayanan Administrasi	1,034,190,000	100%	651,691,000	100%	524,420,469	100%	1,933,068,729	100%	1,461,390,000	100%	1,485,680,000	100%	6,056,250,198	Bappeda & Litbang
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki di masing-masing bidang	-		20,000,000		10,000,000		-		10,000,000		20,000,000		60,000,000	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terakomodirnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	150,000,000		90,691,000		75,000,000		77,178,736		71,390,000		75,000,000		389,259,736	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	75,000,000		30,000,000		30,000,000		10,000,000		20,000,000		30,680,000		120,680,000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Kerja Perkantoran	-		-		50,000,000		150,000,000		50,000,000		50,000,000		300,000,000	
			Penyedian Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum	-		11,000,000		9,420,469		35,000,000		10,000,000		10,000,000		75,420,469	
			Rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya Laporan Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Konsultasi	809,190,000		500,000,000		350,000,000		660,889,993		500,000,000		500,000,000		2,510,889,993	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD Pengelola Kegiatan DAK, Bankeu, Dekon dan TP Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya Laporan Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Konsultasi	-		-		-		1,000,000,000		800,000,000		800,000,000		2,600,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun (2016) Awal Perencanaan (Juta)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Sasaran 2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	75,000,000	100%	65,819,650	100%	45,000,000	100%	120,000,000	100%	45,000,000	100%	50,000,000.00	100%	325,819,650	Bappeda & Litbang
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional yang Memadai	75,000,000		65,819,650		45,000,000		120,000,000		45,000,000		50,000,000		325,819,650	
	Sasaran 3		Program pengembangan data/informasi daerah	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	469,611,000	100%	515,300,000	100%	260,000,000	100%	250,000,000	100%	200,000,000	100%	300,000,000	100%	1,525,300,000	Bappeda & Litbang
			Penyusunan Profile Daerah Kabupaten Malinau	Tersedianya Buku Profil Daerah	173,200,000	1 Buku	171,250,000	1 Buku	100,000,000	1 Buku	150,000,000	1 Buku	100,000,000	1 Buku	100,000,000	5 Buku	621,250,000	
			Penyusunan LKPJ Bupati Malinau Tahunan	Tersedianya Buku LKPJ Bupati Malinau	146,861,000	2 Jenis Buku	132,550,000	2 Jenis Buku	130,000,000	2 Jenis Buku	100,000,000	2 Jenis Buku	100,000,000	2 Jenis Buku	100,000,000	10 Jenis Buku	562,550,000	
			Penyusunan LKPJ Bupati Malinau Akhir Masa Jabatan	Jumlah Buku LKPJ AMJ											100,000,000	2 Jenis Buku		
			Penyusunan Profile Daerah (2016)	Tersedianya Buku Profil Daerah		1 Buku	25,650,000		-		-		-			1 Buku	25,650,000	
			Pengadaan dan Upgrade Perlengkapan Pemetaan Spasial	Tersedianya Peralatan Pemetaan			30,000,000										30,000,000	
			Penyusunan Data Pembangunan Daerah				155,850,000										155,850,000	
			Dokumentasi Penginderaan Jauh Ibu Kota Kecamatan	Tersedianya Data Spasial Eksisting yang Terbaharui pada Ibu Kota Kecamatan yang Belum Tercover Photo Udara	149,550,000		-		30,000,000		-		-		-		30,000,000	
	Sasaran 4		Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Presentase Data Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	-	0%	-	100%	500,000,000	100%	50,000,000	100%	600,000,000	0%	1,000,000,000	100%	2,150,000,000	Bappeda & Litbang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun (2016) Awal Perencanaan (Juta)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi		
						Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Study Kelayakan dan Masterplan Kota Mandiri Kabupaten Malinau		-		-	1 Dokumen	171,161,511							1 Dokumen	171,161,511			
			Study Kelayakan Ibu Kota Malinau Menjadi Kota Mandiri	Tersusunnya Dokumen Study Kelayakan dan Masterplan	-		-	1 Dokumen	328,838,489			-		-		1 Dokumen	328,838,489			
			Updating Dokumen RPIJM Keciptakaryaan	Tersedianya Updating Dokumen RPIJM Keciptakaryaan	-		-		-	1 Dokumen	50,000,000			-		1 Dokumen	50,000,000			
			Master plan Ibu Kota malinau menjadi Kota Mandiri	Dokumen Master Plan Ibu Kota Malinau								1 Dokumen	300,000,000.00							
			Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Jaringan Jalan Kab. Malinau	Dokumen Inventaris Jalan dan jembatan								1 Dokumen	200,000,000.00							
			Penyusunan kajian Koefisien Wilayah Terbangun di Kab. Malinau	Dokumen Kajian Koefisien Wilayah										1 Dokumen	300,000,000.00					
			Penyusunan KLHS Ibu Kota Malinau menjadi Kota Mandiri	Dokumen KLHS Ibu Kota Malinau Menjadi Kota Mandiri								1 Dokumen	100,000,000.00							
			Penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Kebakaran Kawasan Perkotaan Kab. Malinau	Dokumen RIPKA										1 Dokumen	300,000,000.00					
			Penyusunan Dokumen RPPLH	Dokumen RPPLH Kab. Malinau										1 Dokumen	400,000,000.00					
			Review Master Plan Telekomunikasi Kab Malinau	Dokumen Master Plan Telekomunikasi											-					
	Sasaran 5		Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan Daerah	Jumlah Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan daerah	-	0%		-	100%	60,000,000	100%	500,000,000	0%		-	0%	-	100%	560,000,000	Bappeda & Litbang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun (2016) Awal Perencanaan (Juta)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Koordinasi Kegiatan Tim Koordinasi Kabupaten dan TIM Distric Projet Management Unit (DPMU) Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Tersusunnya RAD terkait Air Minum	-		-		30,000,000		-		-		-		30,000,000	
			Koordinasi Strategi Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP/RP2KP)	Tersusunnya RAD Keciptakarya	-		-		30,000,000		-		-		-		30,000,000	
			Penyusunan Dokumen Moda Transportasi	Tersedianya Dokumen Moda Transportasi	-		-		-		500,000,000		-		-		500,000,000	
	Sasaran 6		Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana Jangka Menengah Daerah dengan realisasi tahunan	1,612,913,000	100%	1,201,050,000	100%	4,914,318,000	100%	1,703,550,000	100%	1,925,000,000	100%	1,550,000,000	100%	11,293,918,000	Bappeda & Litbang
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda)	Tersedianya Dokumen untuk Penyusunan RKPD Kabupaten Malinau	595,950,000	1 Dokumen	493,890,000	1 Dokumen	600,000,000	1 Dokumen	600,000,000	1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	500,000,000	5 Dokumen	2,693,890,000	
			Penyusunan KUA,PPAS-Perubahan dan KUA, PPAS	Tersusunnya Dokumen Sebagai Dasar Penyusunan RAPBD	336,350,000	4 Dokumen	297,150,000	4 Dokumen	291,738,000	4 Dokumen	228,550,000	4 Dokumen	250,000,000	4 Dokumen	250,000,000	20 Dokumen	1,317,438,000	
			Rapat Koordinasi Bappeda dan Litbang Se-Provinsi Kalimantan Utara	Terkoordinirnya Perencanaan Pembangunan di Kalimantan Utara	53,310,000	1 Kali	148,690,000	1 Kali	75,000,000	1 Kali	75,000,000	1 Kali	250,000,000	1 Kali	125,000,000	5 Kali	673,690,000	
			Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan RKPD	131,300,000	2 Dokumen	195,920,000	2 Dokumen	250,000,000	2 Dokumen	200,000,000	2 Dokumen	200,000,000	2 Dokumen	200,000,000	10 Dokumen	1,045,920,000	
			Koordinasi dan Monitoring Kegiatan APBN dan Bantuan Keuangan Provinsi	Tersedianya Buku Koordinasi dan Monitoring Kegiatan DAK, Batuan Keuangan Provinsi	-		65,400,000		-		-		-		-		65,400,000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun (2016) Awal Perencanaan (Juta)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Koordinasi Kegiatan DAK, Bantuan Keuangan Provinsi dan TEPRA	Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengendalian Dokumen Perencanaan Tahunan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA)	-		-		150,000,000		-		-		-		150,000,000	
			Monitoring Evaluasi Dana DAK, Bantuan Keuangan, TP dan TEPRA	Tersedianya Dokumen Laporan Kegiatan Monev, DAK, Bankeu dan TEPRA	-		-		-		150,000,000		-		-		150,000,000	
			Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Dokumen Perencanan Tahunan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA)	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahunan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA)	-		-		150,000,000		-		-		-		150,000,000	
			Pembentukan Lembaga dan Forum CSR Kabupaten Malinau	Tersusunnya Dokumen Kelembagaan Tentang CSR	-		-		200,000,000		-		-		-		200,000,000	
			Pengadaan Sistem Informasi Perencanan Pembangunan Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-		-		800,000,000		-		-		-		800,000,000	
			Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Data Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-		-		-		300,000,000		150,000,000		-		450,000,000	
			Kajian Kebutuhan Buku Wajib Belajar Jenjang PAUD, SD, SMP di Kabupaten Malinau	Tersedianya Kajian Kebutuhan Buku Wajib Belajar Jenjang PAUD,SD, SMP, di Kabupaten Malinau	-		-	1 Dokumen	150,000,000		-		-		-	1 Dokumen	150,000,000	
			Penyusunan RPJMD Perubahan	Tersedianya Dokumen RPJMD Perubahan	-		-		310,200,000		-		-		-		310,200,000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun (2016) Awal Perencanaan (Juta)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Tersedianya Dokumen RPJMD	496,003,000		-		-		-		-		-		-	
			Kajian Optimalisasi Dana Transfer Daerah Dalam Percepatan Pembangunan Kabupaten Perbatasan dan Konservasi	Tersedianya Kajian Optimalisasi Dana Transfer Daerah	-		-		1,937,380,000		-		-		-		1,937,380,000	
			Perencanaan dan Penyusunan Usulan Inovasi Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penyusunan Usulan Inovasi Daerah	-		-		-		75,000,000		-		-		75,000,000	
			Pengembangan Jaringan Internet Data Spasial	Tersedianya Akses Jaringan yang memadai	-		-		-		75,000,000		75,000,000		75,000,000		225,000,000	
			Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2022 s/d 2027	Tersedianya Dokumen Teknokratik RPJMD									400,000,000					
			Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD 2022 s/d 2027	Tersedianya Dokumen KLHS RPJMD									100,000,000					
			Penyusunan RPJMD 2022 s/d 2027	Tersedianya Dokumen RPJMD											400,000,000			
	Sasaran 7		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana Jangka Menengah Daerah dengan realisasi tahunan di bidang ekonomi	218,300,000	100%	378,000,000	100%	230,000,000	100%	525,000,000	100%	200,000,000	100%	500,000,000	100%	1,833,000,000	Bappeda & Litbang
			Kormonev Kegiatan Kemakmuran Hijau	Tersusunnya Laporan Kegiatan Kemakmuran Hijau	72,300,000	1 Kali	-		-		-		-		-		-	
			Monitoring Kegiatan Kemakmuran Hijau	Tersusunnya Laporan Kegiatan Monitoring Kemakmuran Hijau	-		30,000,000	4 Kali	-		-		-		-		30,000,000	
			Pendampingan Kemakmuran Hijau	Tersusunnya Laporan Kegiatan Pendampingan Kemakmuran Hijau	-		-		30,000,000	2 Kali	-		-		-		30,000,000	

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun (2016) Awal Perencanaan (Juta)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Study Pengembangan Potensi Ikan Air Tawar	Dokumen Pengembangan Potensi Ikan Air Tawar										300,000,000	1 Dokumen			
	Sasaran 8		Program perencanaan Pembangunan sosial dan budaya	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana Jangka Menengah Daerah dengan realisasi tahunan di bidang sosial dan budaya	753,350,000	100%	890,130,000	100%	250,000,000	100%	660,000,000	100%	350,000,000	100%	325,000,000	100%	2,475,130,000	Bappeda & Litbang
			Analisis Kemiskinan Kabupaten Malinau	Tersedianya Dokumen Analisis Kemiskinan di Kabupaten Malinau	235,250,000		-		-		-		-		-		-	
			Fasilitasi TKPK Kabupaten Malinau	Tersusunnya Laporan Fasilitasi TKPK	125,200,000		-		-		-		-		-		-	
			Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	-		99,450,000		50,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		599,450,000	
			Monitoring Evaluasi Inovasi Pendidikan	Tersusunnya Laporan Monitoring Evaluasi Inovasi Pendidikan	-		-		-		-		-		-		-	
			Pemuktahiran Data dan Informasi Rumah Tangga Miskin	Tersedianya Data dan Informasi untuk Perencanaan dan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	392,900,000		740,680,000		195,480,000		-		-		-		936,160,000	
			Pengendalian Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (RAD-PPK)	Tersedianya Laporan RAD-PPK Kabupaten Malinau	-		50,000,000		4,520,000		-		-		-		54,520,000	
			Penyusunan Laporan TPB/ SDGs	Tersusunnya Laporan TPB/ SDGs	-		-		-		100,000,000		50,000,000		50,000,000		200,000,000	
			Advokasi dan Fasilitasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Tersedianya Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	-		-		-		230,000,000		-		-		230,000,000	
			Koordinasi, Konsultasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Tersedianya Data Bidang Sosial Budaya	-		-		-		180,000,000		150,000,000		125,000,000		455,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun (2016) Awal Perencanaan (Juta)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Sasaran 9		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dalam pembangunan	-	100%	371,150,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	371,150,000	Bappeda & Litbang
			Penyusunan Pedoman Program Unggulan Daerah (2016)				145,000,000		-		-		-		-		145,000,000	
			Pengadaan Sarana Kantor Sekretariat LP3MD (2016)				198,000,000		-		-		-		-		198,000,000	
			Peningkatan Partisipasi Perencanaan Desa (2016)				28,150,000		-		-		-		-		28,150,000	
	Sasaran 10		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Tingkat Pengembangan dan pemanfaatan prasarana wilayah dan sumber daya alam	-	0%	-	100%	100,000,000	0%	250,000,000	0%	600,000,000	0%	150,000,000	100%	1,100,000,000	Bappeda & Litbang
			Peyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian	Tersedianya Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Sentra Pertanian	-		-		100,000,000		-		-		-		100,000,000	
			Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Tersedianya Data Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	-		-		-		250,000,000		200,000,000		150,000,000		600,000,000	
			Penyusunan Rencana Induk Kawasan Perbatasan	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Kawasan Perbatasan	-		-		-		-		400,000,000.00		-		400,000,000	
	Sasaran 11		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pelanggaran tata ruang	-	0%	72,550,000	100%	-	0%	-	0%		0%		100%	72,550,000	Bappeda & Litbang
	Sasaran 12		Program Evaluasi dan pengendalian Pembangunan Daerah		-	0%	-	-	-	-	-	-	450,000,000	-	850,000,000	0%	1,300,000,000	Bappeda & Litbang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun (2016) Awal Perencanaan (Juta)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Evaluasi Renstra dan RPJMD 2016 s/d 2021	Tersedianya Dokumen Evaluasi										300,000,000.00		300,000,000		
			Evaluasi Hasil RENJA Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Renja PD								100,000,000		100,000,000		200,000,000		
			Evaluasi Dana Gerdema dan RT Bersih	Tersusunya Laporan Evaluasi Dana Gerdema dan RTBersih						-		100,000,000.00		100,000,000.00		200,000,000		
			Evaluasi Pelaksanaan Rasda Kab. Malinau	Terlaksananya Serapan Beras Daerah								-				-		
			Monitoring Evaluasi dan Identifikasi Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Sosial	Tersusunnya Laporan Monitoring Evaluasi dan Identifikasi Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Sosial	-		-			-		-		100,000,000		100,000,000		
			Monitoring Stunting Kabupaten Malinau	Tersusunnya Laporan Monitoring Stunting di Kabupaten Malinau	-		-			-		50,000,000		50,000,000		100,000,000		
			Monitoring RAD TB Kabupaten Malinau	Tersedianya Laporan RAD-PPK Kabupaten Malinau	-		-			-		50,000,000		50,000,000		100,000,000		
			Monitoring Evaluasi Dana DAK, Bantuan Keuangan, TP dan TEPRA	Tersedianya Dokumen Laporan Kegiatan Monev, DAK, Bankeu dan TEPRA	-		-			-		150,000,000		150,000,000		300,000,000		
TOTAL					4,163,364,000	64	4,145,690,650	91	6,883,738,469	73	5,991,618,729	64	5,831,390,000	55	6,210,680,000	100	27,763,117,848	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun (2016) Awal Perencanaan (Juta)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
						Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

5,761,250,000
(230,368,729.00)

|

|

|

|

|

|

100,000,000

250,000,000
300,000,000

500,000,000
